

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003-2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra) Daerah yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Belitung tahun 2003-2005;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
  6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Belitung Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 tahun 2002 tentang Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Arsip (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 tahun 2002 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 tahun 2002 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 tahun 2003 tentang Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 2);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003-2005.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung;
- b. Bupati adalah Bupati Belitung;

- c. Rencana strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

## Pasal 2

Rencana Strategis Kabupaten Tahun 2003-2005 merupakan tolak ukur pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan selama tahun 2003-2005.

## BAB II SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Kabupaten Tahun 2003-2005 disusun sebagai berikut :
1. PENDAHULUAN
  2. ANALISIS KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN
  3. PERNYATAAN VISI DAN MISI
  4. TUJUAN DAN SASARAN
  5. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
  6. PENGUKURAN KINERJA
  7. PENUTUP
- (2) Rencana Strategis Kabupaten Tahun 2003-2005 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Kabupaten Tahun 2003-2005 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) atau Nota Keuangan yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah Kabupaten Belitung yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

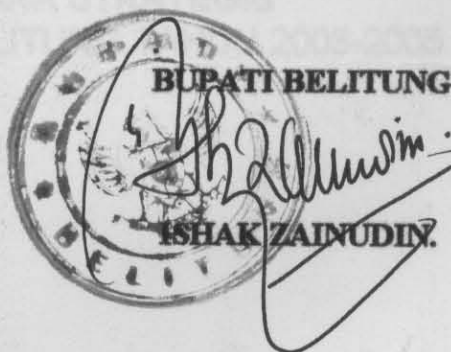
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 11 Juni 2003.



**DIUNDANGKAN DALAM :**

**LEMBARAN DAAERAH  
KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR : 7 TAHUN 2003.**

**TANGGAL : 11 JUNI 2003.**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BELITUNG,**

**DRS. MUKTIE MIMAN  
PEMBINA UTAMA MUDA NIP.440012161**



**RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN LAMPIRAN - 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003-2005**

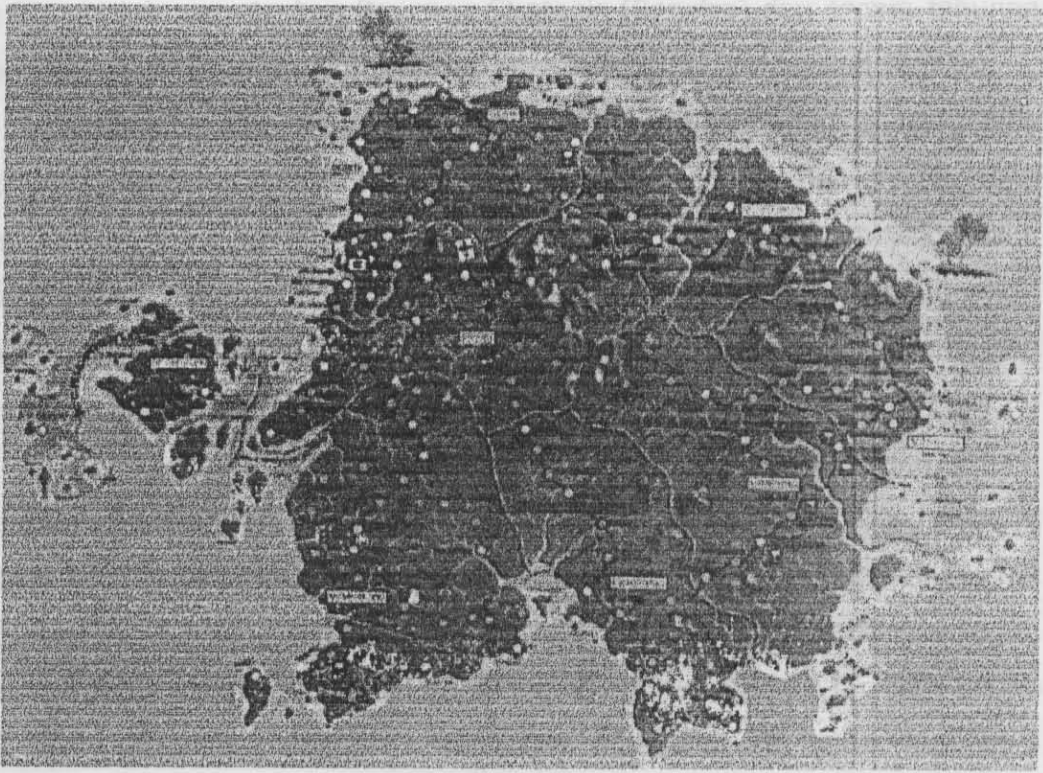
**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**



# KATA PENGANTAR

kinahat reformasi, khususnya berkaitan dengan otonomi daerah dan pendelegasian pemerintahan yang bebas dan secara implisit telah lahir keadilan untuk merencanakan praktek-praktek manajemen instansi. Presiden Nomor 7 tahun 1999 yang mengatur tentang Akas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah selingkat eselon II

## RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 – 2005



masukan-masukan yang bersifat konstruktif.

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**


Belitung, 11 Juni 2003  
  
 Ishak Zainuddin


## KATA PENGANTAR

Amanat reformasi, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN secara implisit menuntut adanya kewajiban untuk menerapkan praktek-praktek manajemen strategis pada sektor publik. Secara eksplisit hal ini antara lain diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan secara tahunan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Secara ringkas melalui penerapan praktek manajemen sektor publik, instansi pemerintah dapat menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif dalam memberikan hasil-hasil (*outcomes*) pembangunan kepada rakyat selaku *stakeholders* utama. Dengan demikian terdapat perubahan penting pada paradigma pemerintahan dari sebelumnya yang berfokus pada kepentingan aparatur ke arah kepentingan masyarakat.

Bertolak dari kondisi tersebut di atas, maka kami selaku Bupati Belitung menyampaikan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Belitung tahun 2003-2005. Meskipun kami dan jajaran terkait telah berusaha untuk memberikan hal yang terbaik, namun selaku manusia biasa kami menyadari pastilah masih terdapat hal-hal yang membutuhkan perbaikan. Oleh sebab itu, kami senantiasa dengan senang hati membuka diri untuk menerima masukan-masukan yang bersifat konstruktif.

Tanjungpandan, 11 Juni 2003  
Bupati Belitung  
  
Ishak Zainuddin





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Kabupaten Belitung tahun 2003-2005 adalah salah satu tonggak penting guna menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan (*services*) sehingga masyarakat selaku *stakeholder* dapat lebih merasakan *outcomes* atau hasil pembangunan. Sesuai dengan hasil analisis terhadap karakteristik kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang meliputi nilai-nilai organisasi, identifikasi kekuatan dan kelemahan (lingkungan internal), peluang dan ancaman (lingkungan eksternal), serta faktor-faktor kunci keberhasilan, maka telah dirumuskan komponen-komponen Renstra, antara lain sebagai berikut:

1. Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang maju dan sejahtera.
2. Misi:
  - (1) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa pemerintahan
  - (2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Tujuan, Sasaran dan Strategi dijabarkan menjadi 6 tujuan strategis, 25 sasaran dan 28 program dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan panca usaha pokok yaitu bidang perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata.

4. Indikator Kinerja: Guna memperoleh informasi kinerja tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta implementasi strategi telah ditetapkan indikator-indikator kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcomes*). Indikator tersebut terdapat untuk setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, maka umumnya indikator kinerja tersebut telah disesuaikan dengan indikator kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu contoh indikator kinerja utama yang diterapkan mengacu pada indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index* (HDI), yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sesuai dengan rentang waktu Renstra, yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 yang hanya mencakup waktu 3 tahun saja dan hasil analisis atas karakteristik lingkungan kelembagaan, maka adalah wajar jika kondisi yang digambarkan dalam visi, yaitu masyarakat yang maju dan sejahtera belum dapat dicapai pada tahun 2005. Secara umum kondisi yang ingin dicapai melalui tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan adalah terciptanya landasan atau *flatforms*, khususnya dalam bentuk sarana dan prasarana guna menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Perlu diperhatikan bahwa Renstra 2003-2005 di masa mendatang akan dilanjutkan dengan Renstra untuk periode-periode selanjutnya, seperti tahun 2006-2010. Dengan demikian, Renstra 2003-2005 hanya merupakan tonggak dari suatu perencanaan yang sistematis dan berisiko guna menuju pencapaian visi Kabupaten Belitung. Selanjutnya posisi Renstra 2003-2005 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi manajemen strategis yang nantinya akan disandingkan dengan rencana kinerja tahunan, anggaran berbasis kinerja, dan LAKIP.

Akhirnya Renstra Kabupaten Belitung tahun 2003-2005 secara utuh akan ditindaklanjuti dengan Renstra oleh masing-masing badan/dinas, dan kantor sehingga sebagai suatu kesatuan akan menciptakan keselarasan tujuan dan sasaran (*Goals and Objectives Congruency*) antara unit-unit organisasi tersebut dalam memberikan *outcomes* kepada *stakeholders*.

Daftar Isi .....	v
1. Pendahuluan .....	1
2. Analisis Karakteristik Kelembagaan .....	7
A. Gambaran Umum .....	7
1. Kondisi Geografis .....	7
2. Potensi dan Pemecalahan Sumber Daya Alam .....	8
3. Kondisi dan Permasalahan Infrastruktur Pendukung .....	9
4. Kondisi Penduduk dan Sumber Daya Manusia .....	13
5. Kondisi Perekonomian .....	15
6. Kondisi Sosial .....	32
7. Kondisi Keuangan Daerah .....	30
B. Nilai-Nilai .....	42
C. Analisis Lingkungan Strategis .....	44
3. Pernyataan Visi dan Misi .....	49
A. Pernyataan Visi .....	49
B. Pernyataan Misi .....	51
4. Tujuan dan Sasaran .....	54
A. Penetapan Tujuan .....	54
B. Penetapan Sasaran .....	55
5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	60
6. Pengukuran Kinerja .....	69
7. Penutup .....	70
Lampiran .....	

# DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	v
<hr/>	
1. Pendahuluan .....	1
<hr/>	
2. Analisis Karakteristik Kelembagaan .....	7
A. Gambaran Umum .....	7
1. Kondisi Geografis .....	7
2. Potensi dan Permasalahan Sumber Daya Alam..	8
3. Kondisi dan Permasalahan Infrastruktur	
Pendukung .....	9
4. Kondisi Penduduk dan Sumber Daya Manusia....	13
5. Kondisi Perekonomian .....	15
6. Kondisi Sosial .....	32
7. Kondisi Keuangan Daerah .....	38
B. Nilai-Nilai .....	42
C. Analisis Lingkungan Strategis .....	44
<hr/>	
3. Pernyataan Visi dan Misi .....	49
A. Pernyataan Visi .....	49
B. Pernyataan Misi .....	51
<hr/>	
4. Tujuan dan Sasaran .....	54
A. Penetapan Tujuan .....	54
B. Penetapan Sasaran .....	55
<hr/>	
5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran .....	60
<hr/>	
6. Pengukuran Kinerja .....	69
<hr/>	
7. Penutup .....	79
<hr/>	
Lampiran	
<hr/>	



# PENDAHULUAN



## RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

# 1 PENDAHULUAN

Implementasi otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mendorong manajemen pembangunan daerah yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. *Good Governance* lebih menekankan pada interaksi berbagi peran di antara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh 3 pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta adanya *rule of law* yang jelas. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku pembangunan, yaitu :

- a. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah.
- b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Dengan demikian agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai-nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberlakuan konsepsi ketatapemerintahan yang baik selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif. Pemerintah daerah mampu menjadi *enabler*, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya untuk memupuk modal sosial (*social capital*) dan berpartisipasi bagi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis pemerintahan yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Berlakunya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dari praktek-praktek KKN.

Perubahan lingkungan di atas mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, dimana kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Desentralisasi atau otonomi daerah yang secara efektif mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2001, telah membawa sejumlah peluang sekaligus tantangan bagi daerah dalam mengembangkan daerahnya masing-masing. Dianggap sebagai peluang karena dengan desentralisasi, daerah lebih bebas mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristiknya masing-

masing. Namun hal ini, sekaligus juga menjadi tantangan karena tuntutan kemandirian yang tercermin dalam otonomi daerah menuntut daerah untuk mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerahnya.

Sejalan dengan perubahan tersebut, terjadi pula perubahan paradigma pembangunan, dari yang dulu lebih berorientasi ke atas menjadi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pendekatan dalam perencanaan pembangunan juga mengalami perubahan dari pendekatan dari atas ke bawah menjadi pendekatan dari bawah ke atas. Hal ini berarti dalam perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan di era desentralisasi ini, kepentingan masyarakatlah yang lebih diperhatikan dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri.

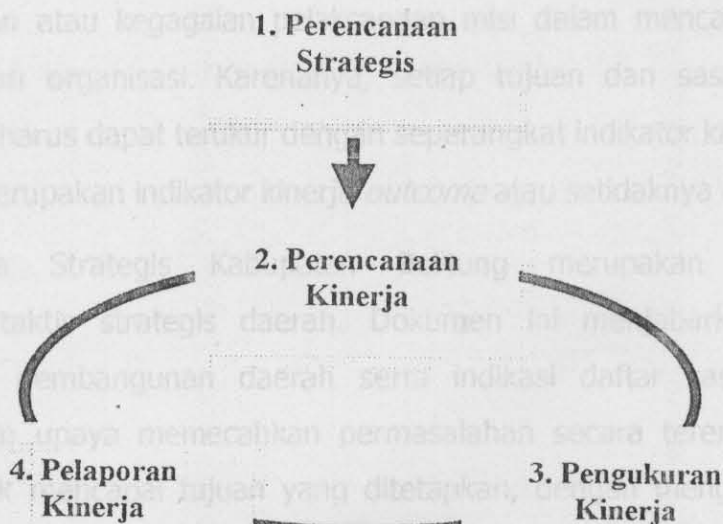
Dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel, PP Nomor 108/2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau dokumen perencanaan daerah lainnya. Dokumen ini selain berfungsi sebagai dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban kepala daerah.

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (biasanya 3 sampai 5 tahun) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut 'Rencana Strategis' atau populer disebut Renstra.

Rencana strategis diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara



mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi. Agar lebih berhasil dalam implementasinya, perencanaan strategis harus merupakan bagian dari satu siklus akuntabilitas secara makro yang berakhir pada pertanggungjawaban mandat yang diberikan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas ke pemerintahannya.



Gambar 1: Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Format Renstra meski beragam dalam prakteknya, namun setidaknya mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut:

- Akan menjadi apa kita dimasa depan (*Where do we want to be*) ? Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis).

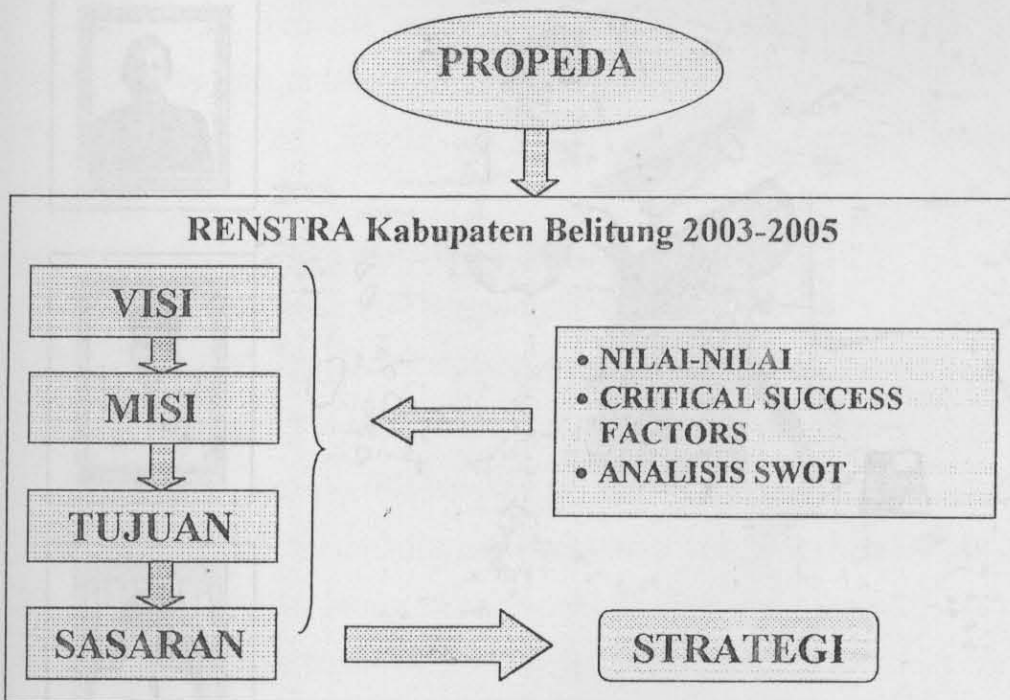
- Dimana posisi kita sekarang (*Where are we now*) ? Analisis organisasi tentang nilai-nilai yang dimiliki, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan kendala organisasi (*SWOT analysis*) serta tugas pokok dan fungsi utama organisasi yang menunjukkan alasan utama keberadaan organisasi (misi)
- Bagaimana cara meraihnya (*How do we get there*) ? Merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Langkah-langkah ini biasanya dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan organisasi.
- Bagaimana kita mengukur kemajuan (*How do we measure our progress*) ? Berkaitan dengan cara organisasi menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Karenanya, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus dapat terukur dengan seperangkat indikator kinerja yang idealnya merupakan indikator kinerja *outcome* atau setidaknya *output*.

Rencana Strategis Kabupaten Belitung merupakan dokumen perencanaan taktis strategis daerah. Dokumen ini menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar sasaran dan program dalam upaya memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Secara ringkas penyusunan Renstra Kabupaten Belitung 2003-2005 dilakukan dengan mengikuti alur pikir seperti yang tertera pada gambar 2.

Berdasarkan alur pikir tersebut, disusunlah unsur-unsur Renstra Pemerintah Kabupaten Belitung seperti nampak dalam gambar 2. yang diawali oleh Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 tahun 2001 tentang PROPEDA Kabupaten Belitung Tahun 2001-2005 dan berakhir dalam bentuk strategi sebagai cara mencapai tujuan dan sasaran. Meskipun bertolak pada PROPEDA, namun bukan berarti Renstra ini tidak memperhatikan

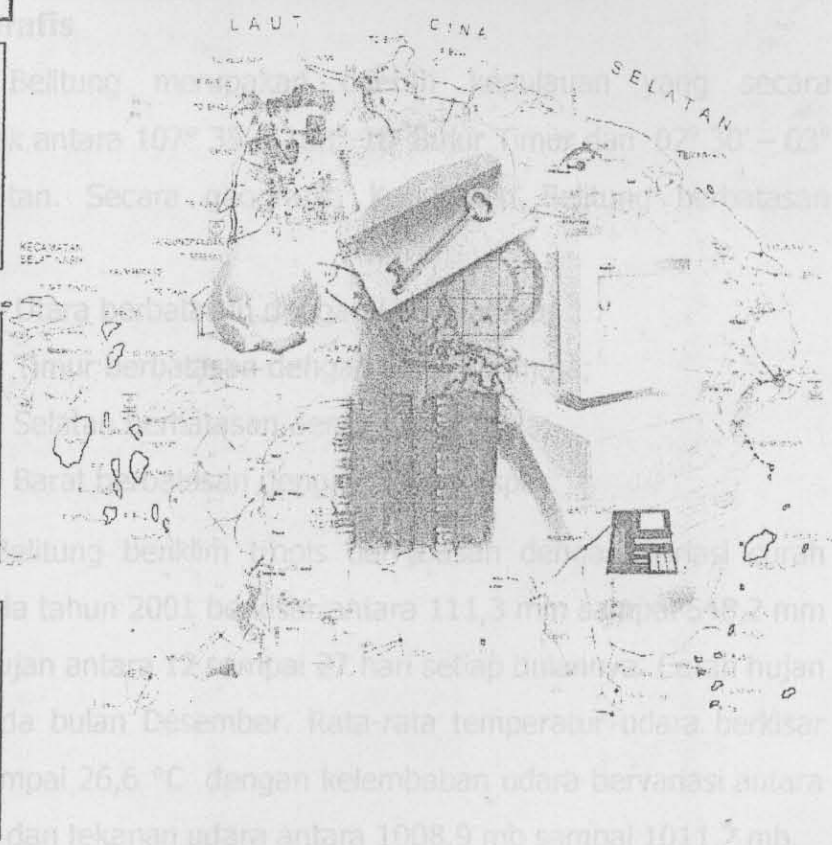
kebijakan pembangunan nasional, seperti: GBHN 1999-2004 dan UU No. 25/2000 tentang PROPENAS. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mutlak bagi Kabupaten Belitung untuk memperhatikan kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan Propinsi Bangka Belitung. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi dasar pertimbangan PROPEDA yang menjadi titik tolak perumusan Renstra Kabupaten Belitung tahun 2003-2005.



Gambar 2: Alur.Pikir Renstra Kabupaten Belitung 2003-2005

# ANALISIS KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN

## ANALISIS KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN



### RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

Pemukaan tanah Pulau Belitung bergelombang/bertukil pada daerah pedalaman, sedangkan daerah yang lebih rendah terdiri atas daerah sekitar pantai dan mempunyai permukaan yang relatif datar. Sebagian besar jenis tanah adalah jenis tanah aluvial, terdiri atas tanah aluvial (pencucian) yang berwarna pucat (*albic*)

## 2 ANALISIS KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Belitung merupakan daerah kepulauan yang secara astronomis terletak antara  $107^{\circ} 35'$  -  $108^{\circ} 18'$  Bujur Timur dan  $02^{\circ} 30'$  -  $03^{\circ} 15'$  Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung beriklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2001 berkisar antara 111,3 mm sampai 548,2 mm dan jumlah hari hujan antara 12 sampai 27 hari setiap bulannya. Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Desember. Rata-rata temperatur udara berkisar antara  $22,8^{\circ}\text{C}$  sampai  $26,6^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban udara bervariasi antara 83% sampai 90% dan tekanan udara antara 1008,9 mb sampai 1011,2 mb.

Permukaan tanah Pulau Belitung bergelombang/berbukit pada daerah pedalaman, sedangkan daerah yang lebih rendah terdiri atas daerah sekitar pantai dan mempunyai permukaan yang relatif datar. Sebagian besar jenis tanah adalah podsolik merah kuning dengan horizon penimbunan besi, aloksida dan bahan organik spodik. Pada lapisan atas terdapat horizon eluviasi (pencucian) yang berwarna pucat (*albic*).

Secara administratif, wilayah Kabupaten Belitung terdiri atas 9 (sembilan) Kecamatan yaitu: Kec. Tanjungpandan, Kec. Manggar, Kec. Kelapa Kampit, Kec. Gantung, Kec. Dendang, Kec. Membalong, Kec. Sijuk, Kec. Badau dan Kec. Selat Nasik, dengan 69 Desa dan 2 Kelurahan serta luas wilayah 480.060 Ha atau 4.800,60 Km<sup>2</sup>.

## 2. Potensi dan Permasalahan Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang paling besar peranannya bagi perekonomian Kabupaten Belitung pada saat ini adalah potensi sumber daya alam bidang pertambangan khususnya Bahan Galian Golongan C. Besarnya potensi sumber daya alam tambang ini tergambar dari kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Belitung, yang mencapai kisaran 60-an persen pada tahun 2000-2002. Perkiraan cadangan potensi bahan galian golongan C di Kabupaten Belitung ditunjukkan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1.**  
**Jenis dan Potensi Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Belitung**

No	Jenis Bahan Galian	Sudah dan Sedang Dieksploitasi	Potensi
1	Kaolin	4.060,08 Ha	7.500 Ha
2	Pasir Kwarsa	4.625,38 Ha	7.500 Ha
3	Tanah Liat	2.256,56 Ha	5.000 Ha
4	Pasir Bangunan	1.445,40 Ha	5.000 Ha
5	Batu Granit	270,40 Ha	2.000 Ha

Sumber : Dinas Pertambangan tahun 2002.

Potensi sumber daya alam tambang jenis bahan galian golongan C di Kabupaten Belitung relatif masih cukup banyak, namun seberapa besar cadangan masing-masing bahan galian belum pernah diukur secara pasti, karena itu sampai saat ini belum diketahui berapa sebenarnya cadangan bahan galian golongan C yang ada dan layak untuk dieksploitasi. Karena bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sedangkan kontribusi sektor pertambangan sangat besar terhadap PAD

Kabupaten Belitung, maka perlu adanya alternatif sumber pendapatan lain untuk mengantisipasi semakin berkurangnya kontribusi sektor pertambangan pada masa yang akan datang.

Selain dari itu, karena eksploitasi sumber daya alam tambang cenderung merusak lingkungan hidup, maka eksploitasinya harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan meminimalkan pencemaran dan pengrusakan terhadap lingkungan hidup.

Sumber daya alam selain tambang yang potensinya cukup besar di Kabupaten Belitung adalah perairan laut Pulau Belitung dengan luas 29.606 Km<sup>2</sup> kaya akan hasil lautnya seperti ikan, teripang, rumput laut, dan hasil laut lainnya. Selain itu perairan laut Pulau Belitung kaya akan terumbu karang yang indah sehingga cukup berpotensi untuk dijadikan objek wisata bawah air. Disamping perairan laut, perairan darat Belitung dapat dijadikan areal budidaya ikan air tawar seperti kelesa, betutu dan patin. Selain itu perairan yang ada di Pulau Belitung berpotensi untuk dijadikan objek wisata pemandian alam.

Permasalahan dalam pengembangan sumber daya perairan laut maupun darat di Kabupaten Belitung adalah masih minimnya budidaya yang dilakukan masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan sumber daya perairan ini sebagian besar berupa pengambilan langsung dari alam. Minimnya budidaya hasil perairan ini, selain karena kekurangan dana, juga minimnya penguasaan teknologi budidaya hasil perairan oleh masyarakat.

### 3. Kondisi dan Permasalahan Infrastruktur Pendukung

Pemerintah daerah sesuai dengan porsinya adalah penyedia kebutuhan publik (*public goods*), oleh karena itu sangat berkepentingan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan sektor swasta yang memproduksi kebutuhan privat (*private goods*). Dalam porsinya sebagai penyedia kebutuhan publik tersebut Pemerintah Kabupaten Belitung

telah menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan antara lain :

**a. Sarana Prasarana Perhubungan :**

Sarana Prasarana Perhubungan di Kabupaten Belitung, meliputi :

**1. Angkutan Darat.**

Prasarana hubungan darat di Kabupaten Belitung ditunjang dengan adanya jaringan jalan. Pada umumnya kondisi jaringan jalan tersebut relatif cukup baik dan sudah dapat menjangkau hampir ke seluruh pelosok kabupaten khususnya desa-desa.

Berdasarkan klasifikasinya di Kabupaten Belitung ini terdapat jalan kabupaten dan jalan propinsi. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 adalah sepanjang 1.114,27 Km, dengan rincian jalan kabupaten sepanjang 720,02 Km, jalan propinsi sepanjang 275,66 Km dan jalan negara diusulkan sepanjang 118,41 Km.

Tabel 2.2.  
Kondisi Jaringan Jalan Di Kabupaten Belitung, 2001 –2002

No.	KEADAAN	Panjang Jalan (Km)					
		Tahun 2001			Tahun 2002		
		Propinsi	Kabupaten	Jumlah	Propinsi	Kabupaten	Jumlah
I.	JENIS PERMUKAAN						
	1. Aspal	354,90	587,22	942,12	354,90	587,22	942,12
	2. Kerikil	-	-	-	-	51,40	51,40
	3. Tanah/Puru	-	132,80	132,80	-	81,40	81,40
	4. Lainnya	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH I</b>	<b>354,90</b>	<b>720,02</b>	<b>1.074,92</b>	<b>354,90</b>	<b>720,02</b>	<b>1.074,92</b>
II.	KONDISI JALAN						
	1. Baik	301,40	243,62	545,02	310,40	274,52	584,92
	2. Sedang	49,50	353,90	403,40	40,50	290,60	331,1
	3. Rusak	4,00	70,60	74,60	4,00	103,00	107,00
	4. Rusak Berat	-	51,90	51,90	-	51,90	51,90
	<b>JUMLAH II</b>	<b>354,90</b>	<b>720,02</b>	<b>1.074,92</b>	<b>354,90</b>	<b>720,02</b>	<b>1.074,92</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung



## 2. Angkutan Laut.

Prasarana Perhubungan Laut di Kabupaten Belitung antara lain terdiri dari Pelabuhan Tanjungpandan, Pelabuhan Manggar dan Pelabuhan Tanjung Ru'. Kondisi Pelabuhan relatif baik. Permasalahan yang terjadi terhadap keberadaan pelabuhan tersebut adalah kondisi teknis pelabuhan, dimana kedalaman alur pelabuhan yang relatif dangkal sehingga tidak memungkinkan kapal-kapal dengan tonase besar untuk masuk. Dengan demikian apabila terdapat kapal-kapal besar harus berlabuh jauh diluar pelabuhan dan pengangkutan orang/barang dilakukan dengan menggunakan kapal lebih kecil. Direncanakan pemerintahan Kabupaten Belitung akan membangun pelabuhan laut Tanjung Batu, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan industri Suge, dengan dukungan dana swasta dan APBN.

**Tabel 2.3.**  
**Data Pelabuhan di Kabupaten Belitung**

No	URAIAN	PELABUHAN		
		TJ. PANDAN	MANGGAR	TJ. RU
1.	Klasifikasi teknis	Buatan	Buatan	Buatan
2.	Kegiatan	Umum	Umum	Penyeberangan
3.	Status/Jalur Pelayaran	- Internasional - Domestik - Lokal	- Internasional - Domestik - Lokal	- Domestik - Lokal
4.	Kedalaman (Ml Ws)	3,5 meter	0,8 s/d 1,2 m	3 meter

Sumber : ADPEL Tanjungpandan, Belitung

Sarana perhubungan laut terdiri atas kapal penumpang dan kapal barang serta kapal ikan dengan tujuan Jakarta, Kalimantan dan Pangkal Pinang. Kapal penumpang yang melintasi trayek Jakarta – Belitung – Kalimantan (Pontianak) terdiri atas 2 (dua) jenis kapal, yaitu kapal milik PT.PELNI dan KM. EXPRESS BAHARI milik Perusahaan Pelayaran Swasta PT. SAKTI INTI MAKMUR, dengan frekuensi pelayaran 3-4 kali seminggu ke dan dari Jakarta dan setiap hari ke Pangkal Pinang.

Pelabuhan yang digunakan bagi arus keluar-masuk orang dan barang di Kabupaten Belitung pada saat ini adalah :

- Pelabuhan Umum Tanjung Pandan;
- Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Ru;
- Pelabuhan Umum Manggar;
- Pelabuhan Rakyat Gantung; dan
- Pelabuhan Rakyat Dendang.

### **3. Angkutan Udara.**

Angkutan udara yang beroperasi saat ini menghubungkan antara Tanjungpandan dengan Jakarta dan Tanjungpandan – Pangkal Pinang. Bandar Udara H. A.S. Hanandjoeddin sebagai pintu keluar-masuk arus penumpang melalui udara terletak  $\pm$  15 Km dari pusat Kota Tanjungpandan, dengan panjang landasan 1.850 m dapat didarati oleh pesawat jenis F-28 MK 4000. Panjang landasan pacu pesawat yang ada pada saat ini perlu ditambah lebih kurang 350 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar Boing 737. Selain itu di Kabupaten Belitung perlu adanya Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (DPPU).

#### **b. Jaringan Listrik dan Air Minum.**

Jaringan listrik telah memasuki 60 desa/kelurahan dari 71 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung termasuk Desa Pulau (Desa Selat Nasik dan Desa Pulau Seliu), dengan daya terpasang 23.568 KVA, sedangkan kebutuhan total listrik di Kabupaten Belitung pada saat beban puncak antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB adalah 13 MW sampai dengan 14 MW.

Untuk air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung sudah tercapai 4.220 unit satuan sambungan dengan kapasitas produksi 10 liter/detik, jumlah instalasi 6. Permasalahan yang dihadapi oleh PDAM pada saat ini adalah belum adanya legalitas untuk penguasaan lokasi sumber air baku PDAM. Untuk mengatasi masalah ini perlu

ditetapkannya peraturan daerah tentang penguasaan lokasi sumber air baku PDAM.

### c. Pos dan Telekomunikasi.

Jasa pos dan telekomunikasi sudah cukup memberikan kemudahan untuk pengiriman barang-barang dari dan ke Belitung. Demikian juga dengan jaringan telepon saat ini sudah tersedia 4.300 satuan sambungan telepon dengan fasilitas sambungan otomatis. Selain itu internet sebagai suatu jaringan telekomunikasi dan informasi juga sudah mulai memasyarakat khususnya di kalangan pelajar dan eksekutif namun kualitas jaringan dimasa mendatang perlu ditingkatkan, demikian juga telekomunikasi diluar kota Tanjungpandan perlu ditingkatkan antara lain melalui kerjasama dengan pihak PT.Telkom dan swasta.

## 4. Kondisi Penduduk dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk pada akhir tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Belitung berjumlah 216.725 jiwa dengan komposisi 110.737 jiwa laki-laki dan 105.988 jiwa perempuan dan jumlah keluarga 51.179. Perkembangan jumlah penduduk tahun 2002 bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,66 persen, hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,68 persen bila dibandingkan perkembangan penduduk tahun 2000 ke tahun 2001 yaitu sebesar 0,98 persen.

Dengan jumlah Penduduk Kabupaten Belitung 216.725 jiwa tahun 2002 dan pertumbuhan rata-rata tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 sebesar 1,25 % per tahun, maka diprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Belitung tahun 2010 dapat mencapai 239.370 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2010 berdasarkan perhitungan tersebut sekitar 50 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2000 (SP-2000)**

No	Kecamatan	Rumah Tangga
1	Membalong	5.043
2	Dendang	3.309
3	Gantung	5.217
4	Manggar	7.781
5	Kelapa Kampit	3.641
6	Tanjungpandan	16.071
7	Sijuk	5.117
8	Badau	2.339
9	Selat Nasik	1.458
	<b>Jumlah</b>	<b>50.036</b>
	<b>SP-1990</b>	<b>41.268</b>

Sumber: Kantor BPS Kabupaten Belitung

**Tabel 2.5.**  
**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Akhir Tahun 2002**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Membalong	11	909,550	10.358	9.974	20.332	22
2	Dendang	6	605,500	7.240	6.563	13.803	23
3	Gantung	7	937,000	11.893	11.060	22.953	25
4	Manggar	10	377,000	17.407	17.158	34.565	92
5	Kelapa Kampit	7	587,410	7.694	7.026	14.720	25
6	Tanjungpandan	12	378,448	36.496	35.701	72.197	191
7	Sijuk	8	458,200	11.099	10.545	21.644	47
8	Badau	6	413,992	5.091	4.786	9.877	24
9	Selat Nasik	4	133,500	3.459	3.175	6.634	50
	<b>Jumlah</b>	<b>71</b>	<b>4.800,600</b>	<b>110.737</b>	<b>105.988</b>	<b>216.725</b>	<b>45</b>
	<b>2001</b>	<b>69</b>	<b>4.800,600</b>	<b>108.759</b>	<b>104.424</b>	<b>213.183</b>	<b>44</b>
	<b>2000</b>	<b>69</b>	<b>4.800,600</b>	<b>107.835</b>	<b>103.282</b>	<b>211.117</b>	<b>44</b>
	<b>1999</b>	<b>69</b>	<b>4.800,600</b>	<b>105.927</b>	<b>101.210</b>	<b>207.137</b>	<b>43</b>
	<b>1998</b>	<b>69</b>	<b>4.800,600</b>	<b>105.194</b>	<b>100.612</b>	<b>205.806</b>	<b>43</b>

Sumber: Kantor BPS Kabupaten Belitung

Dipandang dari segi SDM dan Sosial Budaya maka penduduk Kabupaten Belitung akan sangat memerlukan prioritas peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan distribusi kesempatan kerja dari sektor pertambangan ke arah sektor perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian dan transportasi.

## 5. Kondisi Perekonomian

### a. Kondisi dan Perkembangan Ekonomi Daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku pada tahun 1999 sebesar Rp. 1.035.237.000.000,- meningkat menjadi Rp. 1.176.241.000.000,- pada tahun 2000 dan Rp. 1.363.947.000.000,- pada tahun 2001. Keadaan ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan kegiatan ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.6.**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 1999 - 2001**

NO	LAPANGAN USAHA	KONTRIBUSI (%)		
		1999	2000	2001
1	Pertanian	23,09	23,40	22,86
2	Pertambangan dan Penggalian	8,91	9,27	10,03
3	Industri Pengolahan	22,98	21,21	20,50
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1,51	1,61	1,67
5	Bangunan	6,17	6,44	6,22
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,49	16,00	16,83
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,38	4,54	4,71
8	Kuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	5,77	5,46	5,02
9	Jasa-Jasa	11,70	12,07	12,16
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : PDRB Kab. Belitung Tahun 2001

Kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Belitung tahun 2001 adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar 22,87 %, industri pengolahan 20,50 % dan sektor perdagangan, hotel dan restoran 16,83 %. Secara rinci kontribusi PDRB Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2001 sebesar 4,84 % meningkat dibandingkan angka pertumbuhan tahun 2000 yang sebesar 4,39 %. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sektor yang tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 adalah sektor pengangkutan dan telekomunikasi, yaitu sebesar 8,91 %, kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,78 %; sektor bangunan 6,39 %; sektor pertanian 5,84 %; sektor perdagangan, hotel dan restoran 5,10 %; sektor jasa-jasa 4,37 %; sektor industri pengolahan 3,86 %; sektor pertambangan dan penggalian 3,58 %; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0,88 %.

Berdasarkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Belitung, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang dikenal dengan nama Panca Usaha Pokok (PUP), yaitu terdiri atas : bidang Perikanan dan Kelautan; Pertanian; Perkebunan; Peternakan; Perindustrian dan Pariwisata serta Jasa.

### ***Kondisi dan Perkembangan Sektor Pertanian***

Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Belitung. Berdasarkan PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 22,87 % terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2001.

Sektor Pertanian ini terdiri dari Subsektor Tanaman Bahan Makanan, Subsektor Tanaman Perkebunan, Subsektor Peternakan dan Hasil-hasilnya, Subsektor Kehutanan dan Subsektor Perikanan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan masing-masing subsektor tersebut terhadap perekonomian Kabupaten Belitung, berikut ini akan dijelaskan satu-persatu:

### - Subsektor Bahan Makanan

Subsektor bahan makanan memberikan kontribusi sebesar 1,63 % terhadap PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku tahun 2001. Pada tahun yang sama subsektor ini tumbuh sebesar 0,54 %.

Hasil komoditi yang tergolong dalam subsektor bahan makanan antara lain komoditi padi. Realisasi produksi padi di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 sebesar 656 ton yang terdiri dari 446 ton padi sawah dan 210 ton padi ladang. Daerah penghasil padi sawah di Kabupaten Belitung adalah Kecamatan Membalong dan Kecamatan Gantung. Sedangkan padi ladang dihasilkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Daerah penghasil padi ladang terbesar di Kabupaten Belitung adalah Kecamatan Membalong. Komoditi bahan makanan lain yang dihasilkan di Kabupaten Belitung adalah jagung. Pada tahun 2002 produksi jagung di Kabupaten Belitung sebesar 289 ton, dengan rata-rata produksi 2,89 ton per hektar. Daerah penghasil jagung berada di seluruh kecamatan, dengan penghasil terbesar berada di Kecamatan Badau dan Membalong.

Komoditi bahan makanan lain yang dihasilkan di Kabupaten Belitung adalah ubi kayu, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. Kecuali ubi kayu, sebagian besar kebutuhan masyarakat akan hasil komoditi bahan makanan ini masih didatangkan dari luar daerah.

Mengingat kebutuhan masyarakat akan bahan makanan yang semakin meningkat, sedangkan lahan yang tersedia untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ini masih cukup luas, sementara sampai saat ini Kabupaten Belitung masih sangat tergantung dari pasokan bahan makanan dari luar daerah, maka subsektor ini sangat potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun untuk diekspor.

### - Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan pada tahun 2001 tumbuh 1,75 %, dan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebesar 4,35 %. Berdasarkan pengelolaannya perkebunan yang ada di Kabupaten Belitung dapat digolongkan menjadi 2 yaitu : Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta.

Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat. Tanaman perkebunan yang paling banyak ditanam oleh masyarakat adalah lada, karet, cengkeh, kopi, aren dan kelapa. Pada tahun 2002 jumlah areal tanaman lada di Kabupaten Belitung seluas 13.128,425 Ha dengan hasil produksi sebesar 8.422,07 ton. Dari jumlah produksi tersebut yang diperdagangkan pada tahun 2002 sebesar 2.411,050 ton. Daerah utama penghasil lada di Kabupaten Belitung adalah Kecamatan Membalong. Pada tahun 2002 daerah ini berhasil memproduksi lada sebanyak 5.868,590 ton. Komoditi lain yang dihasilkan dari jenis perkebunan rakyat ini adalah karet, dengan jumlah produksi pada tahun 2002 sebesar 98,320 ton, aren 98,00 ton, dan kelapa 1.186,590 ton.

Selain dari perkebunan rakyat, hasil komoditi perkebunan di Kabupaten Belitung juga berasal dari hasil perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan besar swasta. Tanaman perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Belitung adalah tanaman karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2002 luas areal tanaman karet di Kabupaten Belitung seluas 783,430 hektar, sedangkan luas areal tanaman kelapa sawit seluas 43.073,670 hektar. Produksi kelapa sawit pada tahun 2002 sebesar 604.035,510 ton. Pada saat ini perkebunan besar kelapa sawit telah mampu memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi perkebunannya dengan didirikannya pabrik pengolah buah kelapa sawit sehingga mampu menghasilkan minyak goreng mentah (CPO), dan sisa pengolahan buah



kelapa sawit ini juga telah diolah untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuat sabun.

Untuk pembukaan lahan perkebunan besar diperlukan lahan yang cukup luas, mengingat terbatasnya cadangan hutan yang ada di Kabupaten Belitung maka untuk pembukaan lahan perkebunan besar sebaiknya perlu dibatasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang telah dialokasikan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Belitung No.1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2000 - 2010 telah diatur lahan-lahan yang dimiliki oleh perusahaan besar kelapa sawit, yang belum digarap perlu diatur kembali pemanfaatannya dengan konsep pembangunan perkebunan pola pemberdayaan masyarakat. Pada masa yang akan datang pengembangan perkebunan di Kabupaten Belitung sebaiknya lebih memprioritaskan pada pengembangan perkebunan rakyat pada sektor unggulan seperti lada, karet dan kelapa, karena komoditi perkebunan rakyat seperti lada dan karet telah terbukti mampu meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat petani sekalipun dalam kondisi krisis ekonomi.

#### **- Subsektor Peternakan**

Jumlah produksi daging menurut jenis ternak di Kabupaten Belitung tahun 2002 adalah; ternak sapi 91.250 kg, kambing 7.654 kg, ayam ras 423.871 kg dan ayam buras 104.473 kg. Sedangkan produksi telur ayam di Kabupaten Belitung pada tahun 2002, ayam buras 237.455 kg, dan ayam ras 133.700 kg. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 1,43 % terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2001 atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhannya berdasarkan PDRB harga konstan sebesar 5,46 %.

Kebutuhan konsumsi daging ternak di Kabupaten Belitung sebagian besar masih bergantung kepada daerah lain. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging sapi peternak masih mendatangkan bibit dari luar

**Subsektor Perikanan dan Kelautan**

daerah, sedangkan usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat di Belitung hanya penggemukannya saja. Untuk kebutuhan akan daging ayam, walaupun sudah dapat dipenuhi dari hasil peternak ayam setempat, namun bibit dan pakan ayam masih didatangkan dari luar daerah, begitu juga dengan kebutuhan akan telur ayam ras, sebagian besar kebutuhan telur ayam ras masih didatangkan dari luar daerah.

Karena kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi hasil peternakan yang semakin meningkat, sedangkan ketergantungan Kabupaten Belitung kepada luar daerah untuk memproduksi hasil peternakan masih sangat besar, maka pada masa yang akan datang, peluang untuk mengembangkan usaha peternakan di Kabupaten Belitung ini masih terbuka.

**- Subsektor Kehutanan**

Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku tahun 2001 sebesar 0,96 %. Subsektor ini memberikan kontribusi terendah dibandingkan dengan subsektor-subsektor lainnya yang ada di lingkup sektor pertanian. Walaupun subsektor kehutanan merupakan subsektor yang kontribusinya cukup kecil, namun komoditi hasil hutan merupakan salah satu komoditi perdagangan Kabupaten Belitung. Sebagian besar hasil hutan ini diperdagangkan antar pulau.

Pada tahun 2002 luas hutan yang ada di Kabupaten Belitung 201.685 hektar, terdiri dari 117.486 hektar hutan produksi dan 84.199 hektar hutan lindung. Produksi barang-barang hasil kehutanan di Kabupaten Belitung menurut jenis komoditi adalah :

1. Kayu logs = 2.491,257 m<sup>3</sup>
2. Kayu poles = 17.686,348 m<sup>3</sup>
3. Arang = 396 ton

### - Subsektor Perikanan dan Kelautan

Kontribusi Subsektor Perikanan dan Kelautan sebesar 14,50 % dari total PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku tahun 2001. Kontribusi sebesar ini merupakan kontribusi paling besar dibandingkan dengan kontribusi subsektor lain yang ada di ruang lingkup sektor pertanian dan merupakan kontribusi subsektor terbesar ketiga dari total PDRB Kabupaten Belitung tahun 2001. Sub Sektor perikanan dan kelautan ini pada tahun 2001 tumbuh sebesar 7,82 %.

Sumber daya perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Belitung berada pada wilayah seluas 29.606 km<sup>2</sup>, dengan 189 pulau-pulau yang mengelilingi Pulau Belitung. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung tahun 2002; produksi ikan laut Kabupaten Belitung mencapai 56.946,70 ton. Daerah penghasil ikan laut meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Daerah penghasil ikan laut terbesar adalah Kecamatan Selat Nasik, Manggar dan Sijuk.

Pada tahun 2002 jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Belitung sebanyak 16.413 orang. Alat tangkap ikan yang biasa digunakan para nelayan untuk menangkap ikan di daerah ini adalah jaring, perangkap, pancing dan alat penangkap yang lainnya. Sedangkan sarana transportasi (armada) yang digunakan untuk menangkap ikan beserta jumlahnya adalah : Kapal Motor 2.098 buah, motor tempel 203 buah dan perahu tanpa motor 945 buah. Prasarana pendukung produksi perikanan yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 antara lain : cold storage 5 unit, pabrik es 10 unit dan dermaga 20 unit.

Pemasaran hasil produksi perikanan dengan tujuan pasar lokal, antar pulau dan ekspor. Pada tahun 2002 sebanyak 12.971,2 ton hasil perikanan ini dipasarkan untuk konsumsi lokal, 28.770,3 ton untuk pemasaran antar pulau, dan 480,7 ton untuk diekspor.

Selain potensi diatas, perairan Pulau Belitung juga memiliki terumbu-terumbu karang yang cukup menarik untuk dijadikan objek wisata bawah air, dan juga memiliki pantai berpasir putih yang potensial untuk dijadikan objek wisata.

Melihat potensi perikanan dan kelautan yang masih cukup besar, maka pada masa yang akan datang subsektor ini memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung, karena itu pemerintah pusat melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Kabupaten Belitung sebagai etalase pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia Bagian Barat. Namun demikian pada saat ini permasalahan yang masih dihadapi dalam bidang perikanan dan kelautan ini, yaitu masih banyaknya pengeboman ikan dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya koordinasi yang baik dalam hal pengamanan sumberdaya kelautan oleh pihak-pihak terkait serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengamankan sumberdaya perikanan dan kelautan yang dimiliki Kabupaten Belitung.

### ***Kondisi dan Perkembangan Industri Pengolahan, Koperasi dan Penanaman Modal***

#### ***- Industri Pengolahan***

Industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Kabupaten Belitung. Pada tahun 2001 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 20,50 % dari total PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku. Dengan besaran kontribusi tersebut, menempatkan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Belitung, setelah sektor pertanian. Besarnya kontribusi sektor pengolahan ini tidak terlepas dari peranan barang galian bukan logam (hasil tambang), karena 14,79 % kontribusi sektor

industri pengolahan tersebut berasal dari bahan galian bukan logam, sedangkan sisanya 3,70 % berasal dari industri pengolahan bahan makanan dan minuman, 1,68 % berasal dari barang kayu dan hasil hutan lainnya, 0,33 % berasal dari alat angkutan mesin dan peralatan lainnya, serta 0,01 % berasal dari hasil industri kertas dan barang cetakan.

Perusahaan industri menurut klasifikasi tenaga kerja di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 berjumlah 1.702 unit usaha yang terdiri dari 1.354 unit industri rumah tangga, 323 unit industri kecil dan 25 unit industri sedang. Industri kecil yang berkembang di Kabupaten Belitung sebagian besar kelompok industri pangan dan kerajinan. Pada tahun 2002 jumlah industri pangan yang ada di Kabupaten Belitung sebanyak 908 unit usaha dengan kelompok usaha yang paling besar adalah industri ikan asin sebanyak 165 unit usaha, gula aren 165 unit usaha dan minyak kelapa 123 unit usaha. Sedang industri sedang yang paling dominan adalah industri tepung kaolin dengan jumlah perusahaan sebanyak 17 unit mampu menghasilkan nilai produksi sebesar Rp.54.635.177.000,-.

Jumlah total produksi industri yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 sebesar Rp.86.140.279.000,-, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp.54.635.177.000,- (63,43 %) berasal dari industri tepung kaolin, hal ini membuktikan besarnya peranan sektor pertambangan terhadap perkembangan industri yang ada di Kabupaten Belitung. Melihat kondisi yang ada tersebut, maka perlu adanya perencanaan yang matang untuk mengantisipasi semakin berkurangnya peranan industri kaolin, mengingat bahan bakunya yang merupakan bahan galian/tambang yang tidak dapat diperbaharui dan cenderung merusak lingkungan hidup. Sehingga dengan semakin berkurangnya peranan industri kaolin dan sektor pertambangan pada umumnya, diharapkan tidak akan membawa dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Belitung.

**- Koperasi.**

Pada saat kita ingin mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, perkoperasian dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu faktor pendukung yang cukup menunjang bagi pengembangan sistem perekonomian daerah. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan dunia usaha di Kabupaten Belitung.

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Belitung sampai saat ini terdapat 111 koperasi aktif dari 174 koperasi yang ada dengan jumlah pengurus sebanyak 747 orang, jumlah anggota badan pengawas sebanyak 519 orang, jumlah anggota koperasi 15.455 orang, jumlah karyawan sebanyak 319 karyawan, dan manager sebanyak 9 orang. Sedangkan besarnya jumlah simpanan pokok sebesar Rp. 241.724.615,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 1.285.140.490,- serta simpanan sukarela sebesar Rp. 437.752.485,-.

**- Penanaman Modal**

Demikian pula halnya dengan penanaman modal daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif akan dapat mendukung penanaman modal di Kabupaten Belitung, sehingga akan dapat mempercepat laju pembangunan daerah.

Sektor-sektor yang diminati oleh investor di Kabupaten Belitung terdiri dari sektor Perkebunan, pertambangan, industri makanan, mineral non logam, bangunan, hotel dan restoran serta pengangkutan. Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 terdiri dari 12 (dua belas) perusahaan di sektor perkebunan dengan jumlah realisasi investasi sebesar Rp.729.538.200.000,- dari rencana investasi sebesar Rp. 1.911.488.000.000,-, 7 (tujuh) perusahaan di sektor pertambangan dengan realisasi investasi sebesar Rp. 25.635.600.000,- dari rencana investasi

sebesar Rp. 25.091.800.000,-, 2 (dua) perusahaan di sektor mineral non logam dengan realisasi investasi sebesar Rp. 9.838.000.000,- dari rencana investasi sebesar Rp. 11.337.000.000,-, 1 (satu) perusahaan di sektor industri makanan, bangunan, hotel dan restoran serta pengangkutan. Dengan demikian jumlah realisasi investasi di seluruh sektor di Kabupaten Belitung tersebut adalah sebesar Rp. 765.399.800.000,- dari rencana investasi sebesar Rp. 2.135.849.100.000,-.

Dari keseluruhan penanaman modal yang masuk tersebut, hanya satu yang merupakan penanaman modal asing (PMA) yaitu PT. Steelindo Wahana Perkasa yang bergerak dibidang Kelapa Sawit.

### ***Kondisi dan Perkembangan Sektor Kepariwisata***

Kabupaten Belitung sebagai wilayah kepulauan mempunyai keindahan alam yang potensial untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata. Berbagai jenis objek wisata yang terdapat di Pulau Belitung dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **Wisata Pantai.**

Objek wisata pantai dapat ditemukan hampir di seluruh kecamatan, namun yang sudah banyak dikenal saat ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Objek Wisata Sawah Air	Kecamatan
Taman Laut Memperak	Manggar
Taman Laut Pulau Batu Dinding	Selat Nasik
Taman Laut Lengkuas	Sijuk
Taman Laut Tanjung Kelayang	Sijuk

Tabel 2.7.

## Daerah Penyebaran Objek Wisata di Kabupaten Belitung

Nama Objek Wisata Pantai	Kecamatan
- Pantai Tanjung Kelayang	Sijuk
- Pantai Tanjung Tinggi	Sijuk
- Pantai Tanjung Binga (Bukit Berahu)	Sijuk
- Pantai Mabai	Sijuk
- Pantai Pendaunan Indah	Sijuk
- Pantai Tanjung Pendam	Tanjungpandan
- Pantai Burung Mandi	Manggar
- Pantai Serdang	Manggar
- Pulau Lengkuas	Sijuk
- Pantai Penyabung	Membalung
- Teluk Gembira	Membalung
- Pantai Punai	Dendang

Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah

**Wisata Bawah Air.**

Di perairan laut Belitung banyak terdapat :

- **Terumbu karang**, yang sangat indah, merupakan panorama bawah air yang sangat menarik.
- **Lokasi kapal tenggelam**, di perairan Pulau Belitung juga terdapat beberapa titik lokasi kapal yang tenggelam berpuluh bahkan ratusan tahun yang lalu. Lokasi tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi wisata bawah air.

Tabel 2.8.

## Daerah Wisata Bawah Laut di Kabupaten Belitung

Nama Objek Wisata Bawah Air	Kecamatan
- Taman Laut Memperak	Manggar
- Taman Laut Pulau Batu Dinding	Selat Nasik
- Taman Laut Lengkuas	Sijuk
- Taman Laut Tanjung Kelayang	Sijuk

Sumber : Profil Peluang Investasi Belitung



## Wisata Hutan Tropis.

**Tabel 2.9.**  
**Lokasi Hutan Tropis di Kabupaten Belitung**

Nama Objek Wisata Hutan Tropis	Kecamatan
- Hutan Tropis Gunung Tajam dan Air Terjun Gurok Beraye	Badau
- Hutan Mangrove	Dendang, Gantung, Membalong, Selat Nasik, Sijuk dan Badau

Hutan tropis yang terdapat di beberapa lokasi di Kabupaten Belitung memberikan kesempatan bagi wisatawan yang berjiwa petualang untuk menikmati alam hutan tropis dengan beraneka ragam kayu yang tumbuh didalamnya. Kegiatan *hiking*, menikmati *air terjun* dan *penangkaran berbagai jenis kupu-kupu* merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di hutan tropis tersebut.

## Wisata Budaya.

Belitung mempunyai objek wisata budaya berupa :

- ◆ **Peninggalan kerajaan** abad XV dan situs-situs Raja Badau dan Raja Balok yang pernah memerintah di Belitung.
- ◆ **Peninggalan Pemerintahan Belanda** berupa **Pice**, yaitu suatu bendungan yang berfungsi sebagai pengatur tinggi rendahnya permukaan air sungai yang membelah Kecamatan Gantung.
- ◆ **Museum Pemda Belitung**  
Peninggalan sejarah yang masih abadi hingga sekarang tersimpan dengan baik di Museum yang didirikan oleh PT. Timah dan berlokasi di Kawasan eks Pelataran Timah Tanjung Pendam yang juga termasuk ke dalam kawasan wisata. Benda-benda yang membuktikan bahwa di Kabupaten Belitung banyak terkandung unsur mineral tambang dengan berbagai jenis bahan tambang seperti tanah, batu-batuan, pasir dan berbagai kandungan lainnya

lengkap tersimpan di museum ini. Selain itu terdapat pula Museum Badau, tempat menyimpan barang-barang peninggalan Raja Badau.

#### ♦ **Keramik Kuno.**

Di Kabupaten Belitung terdapat berbagai macam jenis keramik kuno yang diantaranya berasal dari zaman Dinasty China yang masih tersimpan dengan baik di Belitung.

#### ♦ **Cinderamata/souvenir.**

Cinderamata tradisional Belitung seperti kerajinan anyaman pandan, bambu, rotan dan batu satam/*billitonite*.

#### ♦ **Atraksi Budaya Daerah.**

Kesenian daerah dan upacara tradisional cukup banyak antara lain, seperti :

- Becampak : Merupakan suatu kesenian berupa hiburan rakyat dengan menampilkan kesenian "campak melayu" (kesenian berbalas pantun sambil berlelgang diiringi musik tradisional).
- Beripat : Merupakan kesenian berupa permainan adu ketangkasan perorangan dengan menggunakan rotan dan diiringi oleh gendrang adat.
- Upacara Ritual Buang Jong : Merupakan upacara rakyat dengan maksud memberikan persembahan yang didalamnya terkandung unsur *magic* kepada penguasa laut, dengan harapan agar keselamatan nelayan selalu terjamin dan memperoleh hasil yang dapat mensejahterakan keluarga di rumah.
- Maras Taun : Merupakan upacara rakyat yang didalamnya terdapat unsur rasa syukur kepada tuhan yang maha esa atas kesejahteraan yang dinikmati dari hasil usaha yang telah dilakukan.
- Nirok Nanggok : Merupakan upacara rakyat yang dilaksanakan pada musim kemarau, pelaksanaannya berupa penangkapan ikan disungai dengan menggunakan Tirok/Tombak dan Tanggok.

### Agro Wisata.

Dengan banyaknya lahan perkebunan berskala besar yang dibuka di Kabupaten Belitung, merupakan peluang bagi kegiatan agro wisata. Jenis perkebunan kelapa sawit, lada dan karet yang sudah berkembang dengan baik nampak seperti hamparan rumput luas yang menghijau akan merupakan daya tarik tersendiri bagi kegiatan agro wisata.

### Widya Wisata.

Bekas kegiatan penambangan atau eksploitasi bawah tanah, mengakibatkan terbentuknya terowongan yang berbentuk vertikal dan horizontal yang memanjang hingga jarak beberapa kilometer. Bekas tambang timah yang dikerjakan oleh **PT. BHP** yaitu sebuah perusahaan tambang milik Australia, masih meninggalkan terowongan di bawah tanah tersebut, tepatnya berada di bawah Kota Kelapa Kampit. Potensi ini memberikan peluang bagi kegiatan widya wisata (wisata pendidikan) yang mulai disenangi akhir-akhir ini. Walaupun Kabupaten Belitung memiliki potensi wisata yang cukup besar, namun sektor ini belum memiliki peran yang cukup berarti bagi perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya kontribusi subsektor hotel dan restoran yang merupakan sarana wisata utama, terhadap PDRB Kabupaten Belitung tahun 2001 atas dasar harga berlaku, yaitu masing-masing 0,13 % untuk hotel dan 2,07 % untuk restoran.

Pengembangan objek wisata akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Perkembangan sektor pariwisata meliputi antara lain perkembangan hotel, restoran serta jasa hiburan dan rekreasi. Pertumbuhan dan kontribusi masing-masing subsektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Belitung pada tahun 2000 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10.

**Pertumbuhan dan Kontribusi Subsektor Restoran, Hotel, serta Jasa Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Belitung, 2000-2001 (Persen)**

No.	Subsektor	Pertumbuhan		Kontribusi	
		2000	2001	2000	2001
1.	Restoran	7,64	10,22	1,93	2,07
2.	Hotel	6,39	3,14	0,13	0,13
3.	Jasa Hiburan dan Rekreasi	2,22	2,17	0,04	0,04

Sumber : PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2001

Jumlah hotel yang ada di Kabupaten Belitung pada tahun 2001 sebanyak 13 hotel dengan jumlah kamar 201 dan 308 tempat tidur. Keberadaan hotel di Kabupaten Belitung belum menyebar ke seluruh kecamatan. Dari 9 kecamatan yang ada, hanya 3 kecamatan yang baru memiliki hotel. Ketiga kecamatan tersebut adalah kecamatan Tanjungpandan, Manggar dan Sujuk.

Selain hotel, di Kabupaten Belitung terdapat pula rumah makan dan restoran yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu 17 berada di Kecamatan Tanjungpandan, 4 berada di Kecamatan Manggar, 2 di Kecamatan Kelapa Kampit dan 1 di Kecamatan Gantung sedangkan di kecamatan lainnya belum tersedia. Keberadaan rumah makan dan restoran ini akan mendukung hidupnya kepariwisataan di Kabupaten Belitung.

Sekalipun Kabupaten Belitung kaya akan potensi pariwisata, terutama objek wisata alam, namun objek wisata ini belum dikelola secara optimal, sehingga sektor pariwisata ini belum terlalu banyak dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2001 wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung sebanyak 6.569 wisatawan, terdiri dari 6.340 wisatawan domestik dan 189 wisatawan mancanegara.

Walaupun pada saat ini sektor pariwisata peranannya masih relatif kecil, namun melihat potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Belitung cukup besar, maka sektor pariwisata ini memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung pada masa yang akan datang. Kelanjutan pembangunan pariwisata di Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi perlu mendapat perhatian serius. Model pengembangan pariwisata yang akan datang adalah dengan model pemberdayaan masyarakat.

#### **b. Proyeksi Perkembangan Ekonomi Kabupaten Belitung**

Proyeksi perkembangan ekonomi perlu dilakukan untuk memberi dasar yang kuat bagi hasil makro yang akan dicapai oleh daerah terkait dengan berbagai intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam dokumen Rencana Strategis ini. Selanjutnya metode proyeksi yang digunakan adalah metode rata-rata sederhana dengan data dasar nilai perekonomian Kabupaten Belitung tahun 1993 s/d 2000. Hasil proyeksi dari tahun 2002 s/d tahun 2005 selanjutnya ditampilkan pada lampiran 2.

Lampiran 2 menunjukkan proyeksi pertumbuhan serta nilai perekonomian Kabupaten Belitung periode 2002 s/d 2005. Secara agregat perekonomian Kabupaten Belitung diperkirakan akan tumbuh sebesar 4% pertahun dengan berbagai variasi pertumbuhan dan sumbangan sektoral. Sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh sebesar 6 persen, kemudian sektor pertambangan dan penggalian tumbuh sebesar 5 persen, sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 4 persen, sektor listrik, gas dan air bersih tumbuh sebesar 8 persen, sektor bangunan tumbuh sebesar 2 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 4 persen, sektor keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan tumbuh sebesar 3 persen serta sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 2 persen.

Prasyarat bagi tercapainya nilai proyeksi perekonomian tersebut selanjutnya banyak bergantung pada kemampuan berbagai pihak di daerah dalam mengoptimalkan peran pada berbagai aktivitas pembangunan daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan peran barunya dalam era otonomi daerah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi mobilisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung, kemudian dunia usaha harus mampu meningkatkan produktivitas dari setiap aktivitas ekonomi yang dilaksanakan, sedangkan publik yang diharapkan sebagai penerima manfaat dari adanya pertumbuhan ekonomi harus mampu melakukan partisipasi aktif dalam mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

## 6. Kondisi Sosial

### a. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan, digambarkan oleh angka harapan hidup pada tahun 2002 adalah 66,3 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) 1,84/1000 kelahiran hidup tahun 2001 naik menjadi 10,74/1000 kelahiran hidup pada tahun 2002, dan Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2001 sebesar 69,31/100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2002 menurun menjadi 37/100.000 kelahiran hidup.

Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2002 jumlah tenaga medis sebanyak 33 orang, terdiri dari 25 orang dokter umum, 3 orang dokter spesialis, 4 orang dokter gigi dan 1 orang apoteker. Jumlah dan penyebaran tenaga perawat dan bidan juga mengalami kemajuan yang pesat. Pada tahun 2002 tenaga perawat yang ada di Kabupaten Belitung sebanyak 199 orang, perawat gigi 7 orang dan bidan 110 orang termasuk 68 orang bidan desa. Tenaga kesehatan bidang kesehatan masyarakat terdiri dari 7 orang tenaga

sarjana kesehatan masyarakat (SKM), 17 orang tenaga penanganan gizi, dan 15 orang tenaga bidang kesehatan lingkungan, 12 orang asisten apoteker, 2 orang analis kesehatan

Jumlah sarana kesehatan yang ada dinilai telah memadai, namun jika ditinjau dari aspek mutu pelayanan masih dibawah standar, sarana kesehatan seperti rumah sakit belum memenuhi standar minimal. Dalam keadaan seperti ini, mutu pelayanan kesehatan masih perlu peningkatan. Peran serta swasta dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan belum maksimal antara lain karena birokrasi dalam segi perizinan yang sebagian besar masih menjadi kewenangan pusat dan peraturan yang harus ditempuh menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan kesehatan.

Sampai dengan tahun 2002 sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Belitung meliputi:

- RSUD	:	1 buah
- Tempat tidur pasien	:	100 buah
- Puskesmas	:	12 buah
- Puskesmas pembantu	:	40 buah
- Klinik KB	:	13 buah
- Balai pengobatan	:	1 buah
- BKIA Swasta/TNI-POLRI	:	4 buah
- Poliklinik Desa	:	63 buah

### b. Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada pada saat ini dapat digambarkan dengan beberapa komponen yaitu : anak usia sekolah, sarana dan prasarana sekolah, hasil prestasi siswa dan tenaga pengajar.

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM) dari setiap tingkatan sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Belitung tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut.

**Tabel 2.11.**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), 2002**

	<i>SD/MI</i>	<i>SLTP/MTs</i>	<i>SM/MA</i>
<i>APK</i>	119,09%	74,78%	41,72%
<i>APM</i>	89,33%	45,53%	27,11%
<i>Jumlah Siswa</i>	27.652	8.970	5.762
<i>Jumlah Sekolah</i>	241	38	26
<i>Rasio Siswa/Sekolah</i>	114,73	236,05	221,61
<i>Angka Melanjutkan ke SLTP/SM</i>	--	85,65 %	86,28%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung 2002

Pada tahun 2002 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.12.**  
**Jenis dan Jumlah Sekolah Di Kabupaten Belitung, 2002**

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH	NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH
1.	SDN	234	8.	MTsS	3
2.	SDS	4	9.	SMUN	5
3.	MIN	1	10.	SMUS	8
4.	MIS	2	11.	MAN	1
5.	SLTPN	25	12.	MAS	3
6.	SLTPS	8	13.	SMKN	1
7.	MTsN	2	14.	SMKS	8

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung 2002

Penyebaran lembaga pendidikan tersebut belum merata di seluruh kecamatan. Untuk sarana pendidikan SD dan SLTP telah terdapat di semua kecamatan, tetapi SMU dan SMK hanya ada di 4 kecamatan yaitu kecamatan Tanjungpandan, Manggar, Kelapa Kampit dan Gantung. Beberapa sekolah yang ada belum memiliki laboratorium dan perpustakaan, padahal



keberadaan fasilitas tersebut sangat diperlukan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kurikulum.

Hingga saat ini prestasi siswa baru digambarkan dengan perolehan nilai ujian akhir bagi siswa kelas tertinggi dan evaluasi belajar catur wulan atau semester bagi kelas dibawahnya. Berikut ini gambaran hasil perolehan nilai ujian murni SD, SLTP dan SMU pada tahun 2001/2002 .

**Tabel 2.13.**  
**Rata-rata Hasil NEM menurut Jenjang Pendidikan**  
**Di Kabupaten Belitung, 2001/2002**

Rata-rata Hasil NEM	SD/MI	SLTP/MTs	SMU/MA Jurusan IPA
- Bahasa Indonesia	6,26	5,10	5,50
- IPA	8,91	4,74	-
- IPS	5,07	5,17	-
- Matematika	5,96	4,81	2,75
- PPKn	7,73	5,40	6,40
- Bahasa Inggris	-	4,38	4,61
- Biologi	-	-	3,60
- Fisika	-	-	2,97
- Kimia	-	-	3,55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung

Kesesuaian dan kelayakan guru sangat menentukan mutu pendidikan, namun kondisi yang ada pada saat ini, masih banyak tenaga pengajar SD yang masih berpendidikan sekolah menengah, padahal guru SD seharusnya berpendidikan minimal Diploma II. Untuk tenaga pengajar SLTP, masih terdapat 29,14 % tenaga pengajar SLTP yang berpendidikan dibawah Diploma III dan hanya 28,02 % yang berasal dari strata 1. Kondisi lain, masih rendahnya prosentase guru yang mengajar sesuai dengan bidang studinya.

Jumlah tenaga pengajar berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Belitung pada tahun 2002 adalah SD (1.667 orang), MI (25 orang), SLTP (570 orang) dan SLTP Terbuka (23 orang), MTs (61 orang), SMU (277 orang), MA (32 orang) dan SMK (171 orang). Hingga tahun 2002, semua jenjang pendidikan di Kabupaten Belitung masih terjadi kekurangan tenaga pengajar. Jika tidak ada pengangkatan guru baru kekurangan tenaga pengajar ini akan semakin bertambah seiring dengan berdirinya sekolah-sekolah baru.

### c. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2002 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan menempati urutan pertama sebanyak 7.412 orang, kedua sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 3.589 orang. Kecenderungan dari penyerapan tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Berdasarkan perkembangan data tenaga kerja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, hampir seluruh sektor mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja, kecuali di sektor :

- Industri pengolahan dari 422 orang pada tahun 2001 menjadi 329 orang pada tahun 2002.
- Bangunan dari 385 orang pada tahun 2001 menjadi hanya sebanyak 194 orang pada tahun 2002.

Jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Belitung tahun 2000 – 2002 dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut ini.

**Tabel 2.14.**  
**Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Di Kabupaten Belitung Tahun 2000 – 2002**

Tingkat Pendidikan	2000		2001		2002	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Tidak pernah sekolah	-	-	-	-	-	-
Tidak/belum tamat SD	3	1	1	-	1	-
Tamat SD/ sederajat	38	1	30	4	30	4
Tamat SLTP/ sederajat	77	21	381	300	381	300
Tamat SMU/ sederajat	399	370	3602	3146	3.628	3.125
Tamat Sarmud/ sederajat	20	43	246	358	300	420
Tamat Sarjana/ sederajat	82	100	515	340	534	409
Tamat Pasca Sarjana	-	-	-	-	1	0
<b>Jumlah</b>	<b>619</b>	<b>536</b>	<b>4.775</b>	<b>4.148</b>	<b>4.875</b>	<b>4.258</b>
	<b>1.155</b>		<b>8.923</b>		<b>9.133</b>	

Sumber : Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung

Berdasarkan tabel 2.14 di atas jumlah pencari kerja antara tahun 2001 dengan tahun 2002 mengalami peningkatan sejumlah 210 orang, yang terinci sbb :

1. SMU/ sederajat : 6.748 orang meningkat menjadi 6.753 orang  
(5 orang)
2. Sarmud/ sederajat : 604 orang meningkat menjadi 720 orang  
(116 orang)
3. Sarjana/ sederajat : 855 orang meningkat menjadi 943 orang  
(88 orang)
4. Pasca Sarjana/ sederajat : dari tidak ada meningkat menjadi 1 orang

Penyerapan tenaga kerja terkait erat dengan perkembangan industri. Semakin berkembangnya industri di suatu daerah maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, terutama jika industri yang berkembang tersebut bersifat padat karya. Pada tahun 2002 jumlah perusahaan industri di Kabupaten Belitung sebanyak 1.702 unit usaha, meningkat sebanyak 3 unit usaha dibandingkan tahun sebelumnya yang baru berjumlah 1.699 unit usaha. Jumlah penyerapan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan industri tersebut sebanyak 7.680 orang. Kelompok industri yang cukup menonjol adalah kelompok aneka industri yang mampu menyerap 2.676 tenaga kerja. Kelompok aneka industri ini merupakan bagian dari sektor industri kecil yang menyerap tenaga kerja cukup besar.

## 7. Kondisi Keuangan Daerah

Tugas pemerintahan sebagai pelayan publik (*public service*) dan pelaksana pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, besarnya kebutuhan akan pembiayaan pembangunan dihadapkan pada sumber dana yang terbatas. Karena tingkat kebutuhan yang semakin meningkat sementara sumber dana terbatas maka dalam melaksanakan pembangunan perlu ditetapkan skala prioritas.

Kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada suatu tahun anggaran tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tersebut. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang memuat dua sisi yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Sumber-sumber penerimaan APBD terdiri dari :

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah
3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi.
4. Bagian pinjaman pemerintah daerah.

Pengeluaran APBD terdiri dari :

1. Belanja rutin
2. Belanja Pembangunan

Gambaran umum APBD Kabupaten Belitung dari tahun anggaran 1996/1997 – 2002 dapat dilihat pada lampiran 3. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran APBD Kabupaten Belitung seperti terlihat pada lampiran 4.

Sedangkan pengeluaran rutin dipergunakan untuk belanja pegawai (rata-rata 42,59 %)

Kontribusi terbesar dari sumber penerimaan APBD Kabupaten Belitung meliputi:

- Bagian sumbangan dan bantuan (1996/1997 – 1997/1998)
- Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi (1998/1999 – 2000)
- Dana Perimbangan (2001 - 2002)

**Tabel 2.15.**  
**Kontribusi Terbesar Sumber Penerimaan APBD**  
**Kabupaten Belitung, 1996/1997 – 2002**

Tahun Anggaran	Sumber Penerimaan APBD Terbesar	Jumlah	APBD	Kontribusi thdp. APBD
1996/1997	Bagian sumbangan dan bantuan	20.770.047.025	32.690.158.825	63,54
1997/1998	Bagian sumbangan dan bantuan	26.684.063.000	38.238.560.400	69,78
1998/1999	Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	28.730.761.300	34.250.379.221	83,88
1999/2000	Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	49.235.506.000	58.532.968.100	84,12
2000	Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi	36.292.374.500	53.619.149.900	67,69
2001	Dana Perimbangan	88.332.392.150	110.992.943.866	79,58
2002	Dana Perimbangan	118.513.962.577	163.462.234.296	72,50

Sumber : Badan Keuangan kab. Belitung, diolah.

Sumber penerimaan terbesar APBD Kabupaten Belitung berasal dari bantuan pemerintah yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan data pada lampiran 5 diketahui gambaran pengeluaran pembangunan untuk sektor yang pembiayaannya cukup besar adalah :

- Sektor Transportasi;
  - Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi;
  - Sektor Pembangunan Daerah dan Permukiman;
  - Sektor Pendidikan; dan
  - Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.
- Sedangkan pengeluaran rutin dipergunakan untuk belanja pegawai (rata-rata 42,59 %)

Dikaitkan dengan program pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berbasis Panca Usaha Pokok yang terdiri atas sektor perikanan dan kelautan; Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Perindustrian; dan Pariwisata serta Jasa selama periode tahun 1996/1997 – 2002 rata-rata Rp. 1.081.315.714,29 atau 1,91 % dari APBD. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 6, dimana berdasarkan data tersebut belanja sektor panca usaha pokok sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Belitung selama periode 1996/1997 – 2002 realisasinya masih sangat rendah. Agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih cepat, pada masa yang akan datang perlu dilakukan peningkatan anggaran pembangunan bagi sektor PUP ini.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Berdasarkan data pada Tabel 2.16, terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang semakin menggembirakan. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jika pada tahun anggaran 1996/1997 kontribusi PAD terhadap APBD baru mencapai 7,87 persen, sedangkan pada akhir tahun anggaran 2002, kontribusinya mencapai 10,83 %.

**Tabel 2.16.**  
Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Belitung  
Tahun Anggaran 1996/1997 - 2002

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)
1996/1997	2.564.923.291	32.690.158.825	7,87
1997/1998	2.719.512.692	38.238.560.400	7,11
1998/1999	3.974.903.524	34.250.379.220	11,60
1999/2000	7.254.270.315	58.532.968.100	12,39
2000	6.761.064.275	53.619.149.900	12,61
2001	12.371.639.594	110.992.076.450	11,15
2002	17.698.764.167	163.462.234.296	10,83
Rata-rata	7.620.725.408	70.255.075.313	10,51

Sumber : Badan Keuangan kab. Belitung, diolah.

Dilihat dari kontribusi sumber penerimaan dalam PAD, terlihat bahwa pada tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998, penerimaan terbesar PAD Kabupaten Belitung bersumber dari Retribusi uang dispensasi kelas jalan, sedangkan setelah tahun anggaran 1998/1999 – 2002 penerimaan terbesar PAD Kabupaten Belitung bersumber dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

**Tabel 2.17.**  
**Kontribusi Terbesar Sumber PAD Kabupaten Belitung, 1996/1997 – 2002**

Tahun Anggaran	Sumber Penerimaan PAD Terbesar	Jumlah (Rp)	Kontribusi thdp. PAD (%)
1996/1997	Retribusi Uang dispensasi kelas jalan	864.856.500	33,72
1997/1998	Retribusi Uang dispensasi kelas jalan	1.152.270.000	42,37
1998/1999	Pajak pengambilan & pengolahan bahan Galian Gol. C	2.531.465.391	63,69
1999/2000	Pajak pengambilan & pengolahan bahan Galian Gol. C	5.236.601.558	72,19
2000	Pajak pengambilan & pengolahan bahan Galian Gol. C	4.319.881.697	63,89
2001	Pajak pengambilan & pengolahan bahan Galian Gol. C	7.513.057.402	60,73
2002	Pajak pengambilan & pengolahan bahan Galian Gol. C	10.540.032.487	59,55

Sumber : Badan Keuangan Kab. Belitung, diolah.

Terjadinya pergeseran sumber penerimaan PAD terbesar sebagai dampak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber penerimaan terbesar PAD Kabupaten Belitung sejak tahun 1998/1999 berasal dari pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Besarnya Kontribusi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ini, mengindikasikan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah dan masyarakat Belitung terhadap sektor pertambangan.

Mengingat bahan galian merupakan sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui dan eksploitasinya cenderung merusak lingkungan, maka perlu upaya untuk mencari alternatif lain sebagai sumber utama PAD. Pelaksanaan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pada masa yang akan datang kontribusi Pendapatan Asli Daerah tidak lagi didominasi oleh Sektor Pertambangan.

## B. Nilai-Nilai

Merujuk pada bagan alur pikir Renstra, maka perumusan komponen-komponen utama Renstra yang baik, yaitu: visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi; tidak bisa dilepaskan dari karakteristik kelembagaan organisasi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Belitung. Sesuai dengan praktek-praktek terbaik, karakteristik kelembagaan tersebut meliputi nilai-nilai yang dianut organisasi, analisis lingkungan eksternal dan internal (*SWOT Analysis*), serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*Key Success Factors*). Secara umum, keseluruhan karakteristik kelembagaan tersebut sangat bermanfaat untuk memberi arah pada tujuan, sasaran dan strategi organisasi sehingga bisa menghasilkan kinerja yang dapat memuaskan seluruh pihak, khususnya para *stakeholders*.

Sesuai dengan fungsinya sebagai suatu komitmen, nilai-nilai yang disepakati sebagai suatu komitmen untuk menjadi semangat dan jiwa pembangunan di Kabupaten Belitung meliputi 3 nilai utama, yaitu: kerja sama (sinergi), pemberdayaan, dan kemandirian. Secara rinci, penjelasan tentang makna dari nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:



### 1. Kerja sama (Sinergi)

Sesuai dengan latar belakang historis dan budaya masyarakat Kabupaten Belitung, "**Berehun**", *gotong royong* atau kerja sama merupakan faktor nilai luhur yang sangat mendasar dalam menentukan pencapaian suatu cita-cita dan harapan. Dalam konteks Rencana Strategis Kabupaten Belitung 2003-2005, kerja sama antara komponen pemerintahan yang meliputi: masyarakat madani, sektor bisnis, dan pemerintah merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan. Sebagai tambahan, kerja sama ini tidak terbatas pada unsur-unsur yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Belitung saja, tetapi juga dengan pihak-pihak eksternal lainnya, khususnya pemerintah pusat dan propinsi, swasta nasional, dan luar negeri. Dengan demikian adalah menjadi suatu kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk senantiasa memelihara kerja sama antara berbagai pihak untuk mewujudkan Renstra tahun 2003-2005.

### 2. Pemberdayaan

Seiring dengan keinginan untuk menerapkan ketatapemerintahan yang baik, pembangunan di Kabupaten Belitung harus semaksimal mungkin melibatkan adanya partisipasi atau pemberdayaan (*Empowerment*) masyarakat. Nilai ini sangat relevan dengan komitmen kerja sama. Dengan demikian, visi untuk mencapai masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak hanya bergantung pada unsur pemerintahan daerah saja (eksekutif dan legislatif), tetapi juga sangat ditentukan oleh partisipasi aktif komponen-komponen masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan bisnis. Oleh sebab itu, program-program dan kegiatan pembangunan harus disusun secara cermat dengan mempertimbangkan keterlibatan dari unsur-unsur masyarakat selaku *Stakeholders* yang akan menikmati hasil (*outcomes*) pembangunan tersebut.

### 3. Kemandirian

Hal ini merupakan nilai yang sangat relevan dengan semangat otonomi daerah dimana ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat diharapkan semakin berkurang sehingga daerah mampu secara mandiri untuk mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini sejalan dengan semangat *Good Governance*, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Namun demikian semangat mandiri ini tidak boleh dilihat secara hitam putih sebab akan bertentangan dengan prinsip kerja sama. Oleh sebab itu, fokus pembangunan Kabupaten Belitung dalam periode 2003-2005 diarahkan pada kemandirian fiskal melalui optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi sumber daya daerah.

### C. Analisis Lingkungan Strategis

Eksistensi suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut dalam membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan, yang dikenal sebagai *Environmental Scanning Analysis*.

Analisis lingkungan internal berupa kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*), dan lingkungan eksternal berupa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*), secara umum disebut sebagai analisis SWOT. Melalui identifikasi tentang kondisi lingkungan strategis ini, diharapkan dapat dilakukan analisis lanjutan untuk menentukan faktor-faktor

kunci keberhasilan sehingga arah kebijakan organisasi dapat menjadi lebih terfokus dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam rencana strategis.

Secara sistematis, hasil identifikasi terhadap kondisi-kondisi lingkungan strategis dimana Pemerintah Kabupaten Belitung berada adalah sebagai berikut:

#### ***Kekuatan (Strengths):***

1. Kuantitas SDM, khususnya aparatur pemerintahan dimana semua jabatan struktural dan fungsional yang merupakan penggerak utama tugas pokok dan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan telah beroperasi dengan memadai.
2. Adanya komitmen bersama antara pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Adanya penambahan kewenangan pemerintahan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

#### ***Kelemahan (Weaknesses):***

1. Kualitas SDM aparatur, khususnya yang berkaitan dengan profesionalisme pelayanan (budaya kerja) dan aspek pemanfaatan teknologi.
2. Kemampuan keuangan daerah yang berasal dari PAD yang masih sangat terbatas. Hal ini secara nyata terlihat dalam APBD maupun kontribusinya dalam PDRB.
3. Sistem informasi manajemen antara unsur-unsur pemerintahan yang belum berjalan secara optimal, khususnya yang menyangkut sistem dan prosedur kerja.
4. Sarana dan prasarana pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi atau *e-government* yang belum berjalan dengan memadai.

**Peluang (Opportunities):**

1. Potensi kekayaan sumber daya alam khususnya pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan yang berlimpah sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Jumlah angkatan kerja yang cukup memadai, namun belum dapat dioptimalkan potensinya.
3. Letak Kepulauan Belitung yang sangat strategis dan trend globalisasi, khususnya dalam perekonomian dunia yang antara lain ditandai dengan AFTA tahun 2003 memberi peluang semakin besarnya arus keluar masuk barang dan jasa maupun wisatawan.

**Ancaman (Threats):**

1. Tingkat kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah.
2. Cadangan potensi pertambangan bahan galian golongan C sebagai sumber utama perekonomian dan pendapatan asli daerah tidak pasti nilainya. Eksistensi jenis pertambangan ini jika tanpa penegakan hukum yang pasti akan semakin mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hal ini secara nyata ditunjukkan dengan banyaknya lahan-lahan kritis eks lokasi pertambangan.
3. Tingkat ketergantungan yang relatif tinggi pada barang konsumsi dan faktor produksi yang berasal dari luar daerah.
4. Tingginya tingkat pencurian atau eksploitasi sumber daya alam sektor perikanan dan kelautan oleh pihak-pihak asing.
5. Sarana maupun prasarana transportasi dan telekomunikasi yang masih terbatas.

Selanjutnya dari hasil identifikasi kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut dilakukan analisis lanjutan guna menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi (*Key Success Factors*). Faktor-faktor tersebut

merupakan suatu kondisi yang perlu disediakan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran maupun implementasi strategi organisasi. Dari hasil analisis tersebut, maka faktor-faktor kunci keberhasilan yang mutlak harus tersedia untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Belitung adalah:

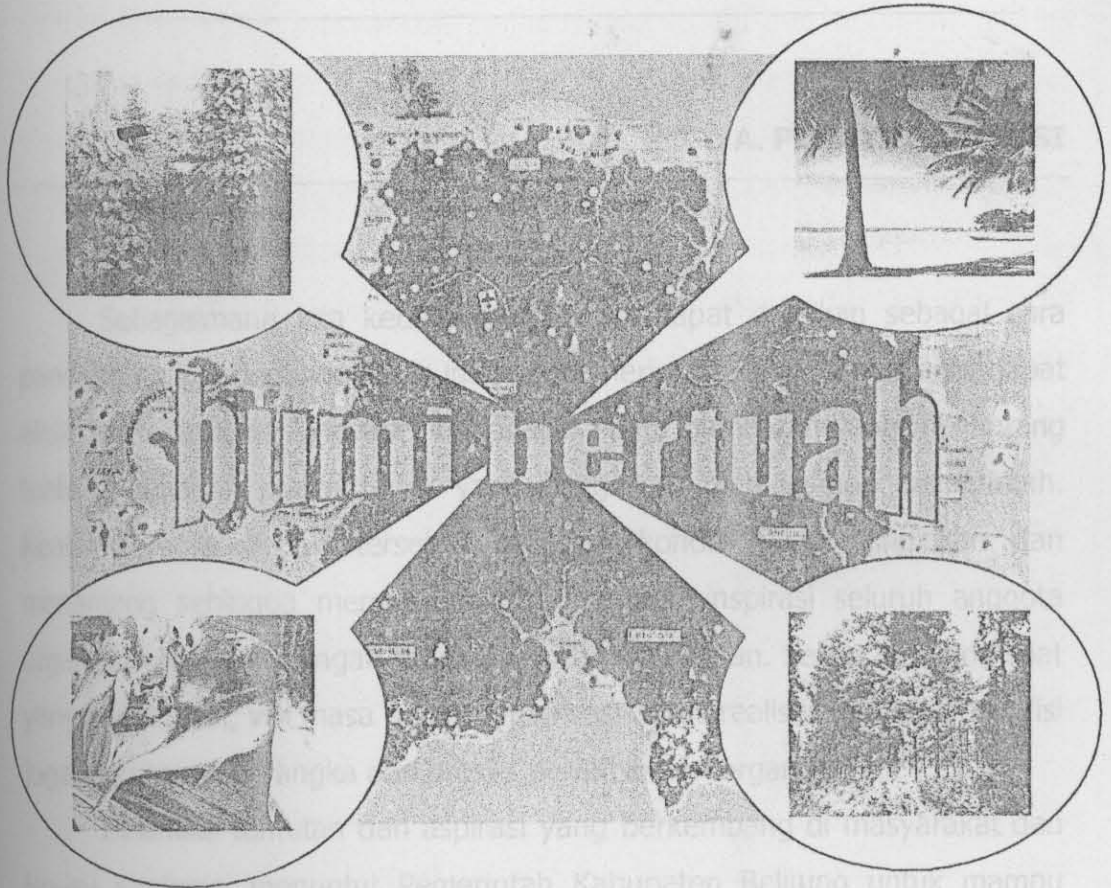
1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan SDM, baik untuk aparatur pemerintahan maupun masyarakat umum.
2. Pemanfaatan yang optimal terhadap potensi sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sebagai kontributor utama perekonomian daerah sehingga kontributor utama PAD dapat bergeser dari sektor pertambangan golongan C ke sektor-sektor lainnya.
3. Penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan operasi pertambangan golongan C, pencurian dan pengrusakan kekayaan laut untuk meminimalkan resiko kerusakan lingkungan hidup.
4. Peningkatan sarana/prasarana, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, kelistrikan dan telekomunikasi untuk mendukung roda perekonomian daerah.
5. Perlunya sinergi antara seluruh komponen masyarakat dan unsur pemerintahan, termasuk pemerintah pusat dalam pengelolaan potensi-potensi daerah, termasuk rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup guna mencapai kondisi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).
6. Penyusunan sistem dan prosedur kerja yang baku, penerapan teknologi informasi serta manajemen berbasis pengetahuan (*knowledge management*), khususnya dalam organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam melayani masyarakat.

Hasil identifikasi dan analisis terhadap karakteristik lingkungan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belitung ini selanjutnya dijadikan sebagai pengendali (*driver*) dalam menetapkan tujuan, sasaran dan program pembangunan. Dengan kata lain, dengan melihat pada isu-isu strategis tersebut, program dan kegiatan pembangunan dapat menjadi lebih terarah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada maupun yang diantisipasi akan terjadi.

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG  
TAHAP 2003 - 2005

**BERSIH - ELOK- RAMAH- TERTIB - ULET – AMAN - HARAPAN**

**PERNYATAAN VISI DAN MISI**



**RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2003 - 2005**

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Belitung  
yang Maju dan Sejahtera**

# 3

## PERNYATAAN VISI DAN MISI

### A. PERNYATAAN VISI

Sebagaimana kita ketahui bahwa visi dapat diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Keadaan masa depan tersebut haruslah kondisi yang diinginkan dan menantang sehingga memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, pada saat yang bersamaan, visi masa depan organisasi harus realistis dan kredibel. Visi juga merupakan kerangka dari proses perencanaan organisasi.

Dinamika tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan isu-isu strategis, menuntut Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mampu mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kejelasan visi pembangunan daerah menjadi sangat penting dalam menentukan arah masa depan pembangunan di Kabupaten Belitung.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada dewasa ini, termasuk tuntutan, aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, maka ditetapkanlah visi Kabupaten Belitung yaitu:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Belitung  
yang Maju dan Sejahtera**



Berdasarkan visi di atas, jelas bahwa arah jangka panjang atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam proses pembangunan di Kabupaten Belitung adalah terwujudnya masyarakat Belitung yang maju dan sejahtera. Visi ini konsisten dan sejalan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Belitung tahun 2001-2005. Hal ini dapat dimengerti sebab adanya keterkaitan antara Propeda dan Renstra sebagai bagian dari penerapan praktek manajemen strategis pada sektor publik di Indonesia.

Sesuai dengan pernyataan visi tersebut, terdapat dua unsur berupa kualitas utama yang ingin dicapai di masa depan di Kabupaten Belitung, yaitu keadaan masyarakat *maju* dan *sejahtera*. Penjelasan tentang kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang maju mengandung pengertian bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung ingin mewujudkan masyarakat Belitung yang unggul, baik dari segi budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknologi maupun dari aspek kualitas kehidupan lainnya yang lazimnya berubah sesuai dinamika perkembangan sistem dan tata nilai yang berlaku.
2. Sedangkan masyarakat yang sejahtera menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung bermaksud mewujudkan masyarakat yang secara ekonomi mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan lainnya sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang tingkat pembangunannya telah berada di depan. Selain itu, sejahtera juga berarti bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani atau spiritual, termasuk ketertiban dan keamanan.

Apabila dibandingkan dengan rentang waktu Renstra tahun 2003-2005 yang hanya mencakup 3 tahun saja, harus diakui bahwa ukuran kualitas maju dan sejahtera yang diinginkan tersebut belum akan dapat dicapai pada akhir tahun 2005. Namun hal ini bukan berarti bahwa visi tersebut di atas sebagai suatu yang ambisius atau muluk-muluk. Sesuai dengan pertimbangan

terhadap berbagai aspek, khususnya kemampuan sumber dana, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki, hal yang dicapai pada akhir tahun 2005 adalah terciptanya suatu landasan (*flatforn*) yang kokoh dari hasil-hasil pembangunan menuju ke arah tercapainya cita-cita masyarakat yang maju dan sejahtera.

## B. PERNYATAAN MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana cara melakukannya.

Secara ringkas, dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti: tugas pokok dan fungsi pemerintahan, serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Belitung, telah ditetapkan 2 misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa pemerintahan.**
2. **Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.**

Secara eksplisit pernyataan misi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa pemerintahan

Pernyataan misi pertama ini berkaitan erat dengan alasan utama eksistensi suatu lembaga pemerintahan yaitu melaksanakan fungsi pelayanan berupa jasa-jasa pemerintahan kepada para pelanggannya, khususnya masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi dasar pengaturan (*regulatory*) yang melekat pada organisasi pemerintah. Sesuai dengan posisi Pemerintah Kabupaten Belitung, maka jasa-jasa pelayanan yang dapat diberikan juga beraneka ragam, mulai dari pelayanan yang bersifat mendasar sampai ke masalah perizinan.

Contoh bentuk pelayanan yang dapat diberikan antara lain berupa: penyediaan sarana/prasana pendidikan dan kesehatan, pelayanan urusan kependudukan, izin keramaian, dan izin usaha. Secara operasional, umumnya jasa-jasa pelayanan yang dimaksud telah dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan telah didelegasikan kepada unit-unit kerja yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung, mulai dari tingkat kelurahan dan unit pelaksana teknis, sampai kepada badan/dinas dan kantor.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber-sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Pernyataan misi kedua ini sangat erat kaitannya dengan posisi organisasi pemerintah dalam sudut pandang tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu sebagai katalisator yang berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah. Dalam hal ini sebagai katalisator, pemerintah sudah seharusnya memberdayakan potensi-potensi sumber daya daerah yang antara lain meliputi: sumber daya alam (SDA), sumber

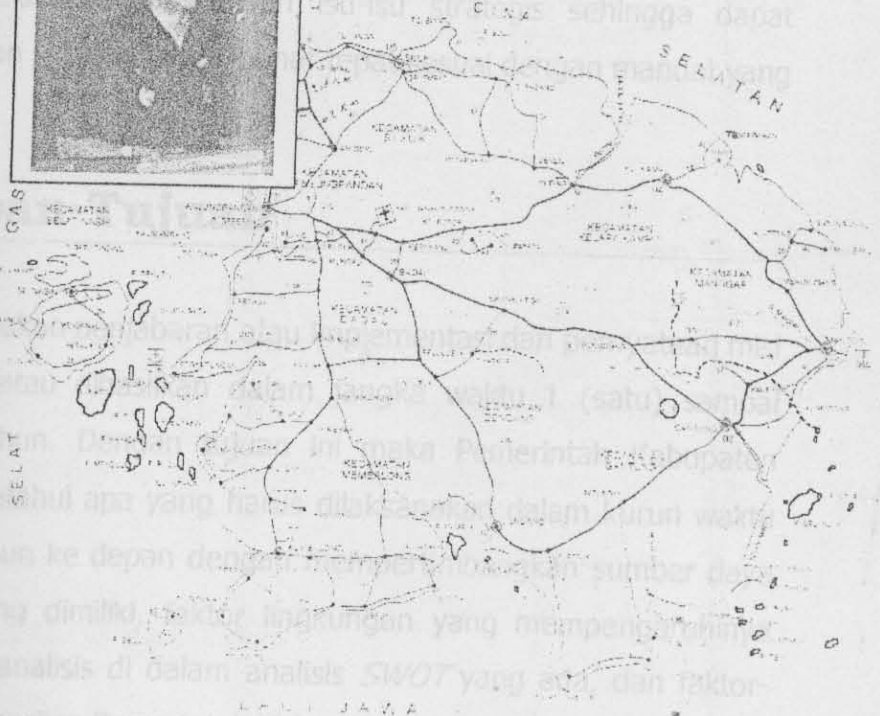
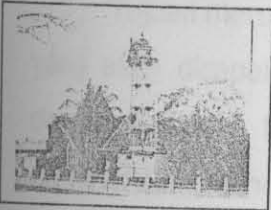
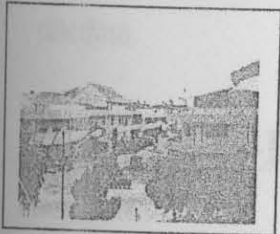
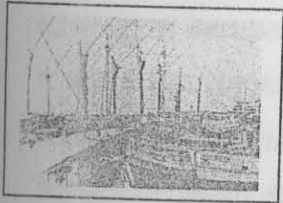
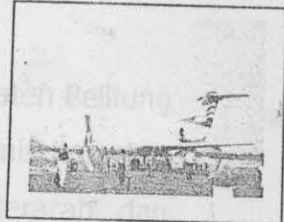
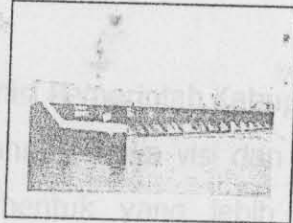
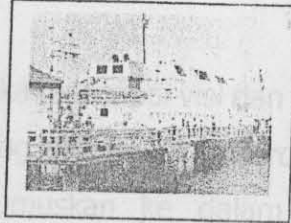
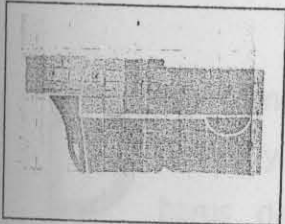
daya manusia (SDM) dan dana guna mendukung terciptanya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat, khususnya yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Belitung.

Dengan demikian, melalui pernyataan misi ini secara implisit terlihat bahwa secara sistematis dan terencana Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengambil suatu inisiatif dan komitmen untuk memajukan peran dan partisipasi unsur masyarakat madani dan bisnis sebagai pelaku utama dalam manajemen pembangunan daerah. Hal ini tentulah suatu inisiatif yang sangat positif dan sangat sesuai dengan semangat reformasi, khususnya semangat otonomi daerah.

Di satu sisi, meskipun Pemerintah Kabupaten Belitung menetapkan 2 misi yang berbeda, namun di sisi lainnya antara kedua misi tersebut terdapat keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya sehingga sukses atau gagalnya kinerja pemerintahan sangat ditentukan oleh operasionalisasi kedua misi tersebut secara berimbang dan dinamis. Dalam bentuk yang lebih konkrit, misi pelayanan jasa pemerintahan tidak bisa lagi hanya dipandang dari sisi kekuasaan saja yang menekankan pada kewenangan sebagaimana yang lazim terjadi pada praktek-praktek pemerintahan di masa lampau tetapi juga harus mempertimbangkan misi optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber daya daerah yang merupakan representasi dari pemerintahan modern yang bersifat katalis.

# TUJUAN DAN SASARAN

## TUJUAN DAN SASARAN



## RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

Meningkatkan pelayanan jasa-jasa pemerintahan

# 4

## TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Belitung terlebih dahulu melakukan perumusan isu-isu strategis sehingga dapat ditetapkan tujuan dan sasaran benar-benar tepat sesuai dengan mandat yang diterima.

### A. Penetapan Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini maka Pemerintah Kabupaten Belitung telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhinya seperti yang telah dianalisis di dalam analisis *SWOT* yang ada, dan faktor-faktor penentu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Adapun tujuan Pemerintah Kabupaten berdasarkan misinya adalah sebagai berikut :



**Misi Pertama:** jarangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan

***Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa serangkaian pemerintahan***

Dengan tujuan:

- 1.1 Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional, kreatif, dan dipercaya
- 1.2 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- 1.3 Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat



**Misi Kedua:**

***Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat***

dengan tujuan:

- 2.1 Terwujudnya kemandirian keuangan daerah
- 2.2 Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh
- 2.3 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

## **B. Penetapan Sasaran**

Sasaran yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung merupakan penjabaran dari masing-masing misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan oleh Pemerintah Daerah beserta jajarannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran atau *objectives* merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Secara menyeluruh sasaran tahunan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat diuraikan sebagai berikut:

### **MISI PERTAMA: Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa Pemerintahan**



**Tujuan 1:** *Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional, kreatif, dan dipercaya*

dengan sasaran:

- 1.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana "need assesment centre"
- 1.1.2 Tersedianya standarisasi kompetensi jabatan
- 1.1.3 Terselenggaranya pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi
- 1.1.4 Terselenggaranya diklat teknis dan struktural
- 1.1.5 Dikembangkannya knowledge management





**Tujuan 2:** *Realisasi pemanfaatan potensi sumber daya  
Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas  
KKN*

dengan sasaran: *terwujudnya kemandirian keuangan daerah*

- 1.2.1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
- 1.2.2 Memperkuat basis sistem penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah



**Tujuan 3:** *Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat*

dengan sasaran:

- 1.3.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan angkutan laut, darat, udara, telekomunikasi dan kelistrikan
- 1.3.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
- 1.3.3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- 1.3.4 Optimalisasi Program RSUD
- 1.3.5 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- 1.3.6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar
- 1.3.7 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

**MISI KEDUA: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat**



**Tujuan 1:**  
***Terwujudnya kemandirian keuangan daerah***

dengan sasaran:

2.1.1 Optimalisasi Penerimaan Daerah



**Tujuan 2:**  
***Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh***

dengan sasaran:

- 2.1.2 Memperbaiki sarana dan prasarana pemukiman di pedesaan dan perkotaan
- 2.1.3 Meningkatkan daya dukung SDA
- 2.1.4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor sektor ekonomi unggulan

- 2.2.1 Mengembangkan komoditi pertanian dan peternakan
- 2.2.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata
- 2.2.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan nusantara
- 2.2.4 Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata
- 2.2.5 Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan
- 2.2.6 Menurunnya kasus pencurian hasil laut dan kerusakan lingkungan

**Tujuan 3:**

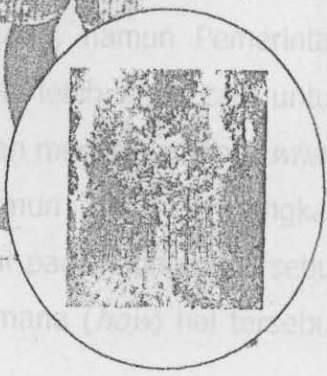
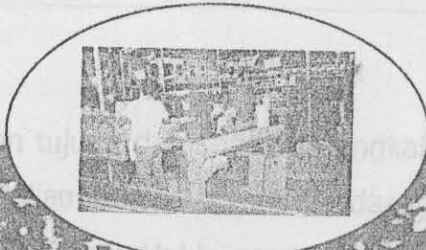


***Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat***

dengan sasaran:

- 2.3.1 Memfasilitasi perluasan kesempatan kerja
- 2.3.2 Memperbaiki sarana dan prasarana pemukiman di pedesaan dan perkotaan
- 2.3.3 Meningkatkan daya dukung SDA  
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor-
- 2.3.4 sektor ekonomi unggulan

# CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN



## RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

...tujuan dan sasaran...  
...menetapkan kebijakan, program...  
...kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya...  
...lingkungan yang dihadapi.

## 5 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Setelah menetapkan tujuan dan sasaran, langkah selanjutnya adalah menentukan kebijakan dan program berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan organisasi. Hal ini merupakan tahapan yang penting dalam menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi dari suatu instansi pemerintah. Cara mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam program yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program yang merupakan peran serta secara aktif dari masyarakat sebagai tanggapan atas program pemerintah serta kinerjanya.

Meskipun telah ditentukan sasaran tahunan dengan jelas dan terdapat keterkaitan yang nyata dengan tujuan lima tahunan, namun Pemerintah Kabupaten Belitung merasa perlu untuk menjabarkan lebih lanjut cara untuk mencapai visi dan misi organisasi. Tujuan dan sasaran merupakan apa (*what*) dan kapan (*when*) sesuatu akan dicapai. Namun demikian langkah Pemerintah Kabupaten Belitung tidak hanya sampai pada tahapan tersebut saja, akan tetapi perlu ditentukan mengenai bagaimana (*how*) hal tersebut dapat dicapai.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan tampak sebagai berikut:

**MISI PERTAMA: Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa Pemerintahan**

**Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional, kreatif, dan dipercaya**

akan diwujudkan melalui sasaran sebagai berikut:

- |                  |   |
|------------------|---|
| <b>Sasaran 1</b> | <b><i>Tersedianya sarana dan prasarana "need assesment centre"</i></b>              |
| <b>Sasaran 2</b> | <b><i>Tersedianya standarisasi kompetensi jabatan</i></b>                           |
| <b>Sasaran 3</b> | <b><i>Terselenggaranya pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi</i></b> |
| <b>Sasaran 4</b> | <b><i>Terselenggaranya diklat teknis dan struktural</i></b>                         |
| <b>Sasaran 5</b> | <b><i>Dikembangkannya knowledge management</i></b>                                  |

Untuk mencapai ke lima sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan satu program yaitu Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dimana penanggung jawab program ini adalah Badan Kepegawaian Daerah. Penanggung jawab program disini diartikan sebagai koordinator, namun dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, karena disadari bahwa peningkatan kualitas aparat merupakan unsur yang sangat penting

dan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Program Pembangunan Kabupaten Belitung.

Program peningkatan kualitas SDM aparatur tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dengan kegiatan-kegiatan antara lain seperti: pengiriman tenaga potensial untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi; pengkajian *needs assesment* kebutuhan diklat struktural, fungsional dan teknis; penyusunan standarisasi kompetensi jabatan struktural; dan kegiatan simposium, temu ilmiah, penyusunan buku/makalah/jurnal dalam rangka pengembangan *knowledge management*.

## **Tujuan 2: Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**

akan diwujudkan melalui sasaran sebagai berikut:

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sasaran 1</b> | <b><i>Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan</i></b>        |
| <b>Sasaran 2</b> | <b><i>Memperkuat basis sistem penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung</i></b> |

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan dua program yaitu: Program Pemberantasan KKN dengan penanggung jawab program Badan Pengawas Kabupaten; dan Program Pengembangan Sistem Informasi dengan penanggung jawab program Sekretariat Kabupaten.

Program Pemberantasan KKN dapat dijabarkan lebih lanjut melalui kegiatan-kegiatan antara lain: membentuk forum komunikasi dan sosialisasi pemberantasan KKN; menyusun kebijakan dalam upaya memberantas KKN;

meningkatkan pengawasan; melimpahkan kasus-kasus yang berindikasi KKN ke Kejaksaan dan memantau tindak lanjutnya.

Sedangkan Program Pengembangan Sistem Informasi akan ditindaklanjuti dengan kegiatan antara lain menyusun sistem informasi pengawasan

### **Tujuan 3: Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat**

akan diwujudkan melalui sasaran sebagai berikut:

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sasaran 1</b> | <b><i>Meningkatkan fasilitas pelayanan angkutan laut, darat, udara, telekomunikasi dan kelistrikan</i></b> |
| <b>Sasaran 2</b> | <b><i>Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan</i></b>  |
| <b>Sasaran 3</b> | <b><i>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</i></b>  |
| <b>Sasaran 4</b> | <b><i>Optimalisasi Program RSUD</i></b>  |
| <b>Sasaran 5</b> | <b><i>Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan</i></b>   |
| <b>Sasaran 6</b> | <b><i>Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar.</i></b>   |
| <b>Sasaran 7</b> | <b><i>Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.</i></b>  |

Sasaran pertama akan dicapai melalui program Peningkatan/ Pengembangan Fungsi dan Fasilitas Pelayanan Perhubungan Laut, Darat, Udara, Telekomunikasi dan Kelistrikan di Kabupaten Belitung dengan penanggung jawab Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertambangan dan Energi melalui kegiatan antara lain: meningkatkan fungsi pelabuhan laut agar memungkinkan kapal-kapal dengan tonase besar dapat berlabuh; menambah panjang landasan pacu pelabuhan udara guna memberikan kemudahan pendaratan pesawat berbadan lebar; menambah jaringan listrik pedesaan.



Sasaran kedua akan dicapai melalui dua program yaitu: Program Pengembangan Standar Pelayanan; dan Program Pelayanan Satu. Atap dengan kegiatan antara lain: menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan; meningkatkan kualitas aparat pelayanan; meningkatkan teknologi di bidang pelayanan.

Sasaran ketiga dan keempat diharapkan akan dicapai melalui dua program yaitu: Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan penanggung jawab program Dinas Kesehatan dan Rumah Rakit Umum Daerah. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat mencakup kegiatan antara lain: meningkatkan kualitas SDM kesehatan; mengevaluasi dan meningkatkan sistem dan prosedur penanganan pasien; mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan dan rumah sakit; memfasilitasi terjalinnya kerjasama dengan pihak swasta di bidang kesehatan; dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sedangkan Program Upaya Kesehatan Masyarakat mencakup kegiatan antara lain: penyuluhan di bidang kesehatan; kampanye tentang cara hidup sehat.

Sasaran kelima diharapkan akan dicapai melalui program perluasan dan pemerataan pendidikan dengan kegiatan antara lain meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dari kalangan kurang mampu.

Sasaran keenam diharapkan akan dicapai melalui program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan guru. Program pada sasaran lima dan enam ini penanggung jawabnya adalah Dinas Pendidikan.

Sasaran ketujuh diharapkan akan dicapai melalui program pembinaan kehidupan beragama dengan penanggung jawabnya adalah Sekretariat daerah.

**MISI KEDUA: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat**

**Tujuan 1: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah**

akan diwujudkan melalui sasaran sebagai berikut:

**Sasaran 1     *Optimalisasi Penerimaan Daerah***

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, dalam tiga tahun pertama ini, Pemerintah Kabupaten Belitung memfokuskan segala upaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui program peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Melalui program tersebut, direncanakan akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: studi rencana tindak peningkatan PAD; studi identifikasi potensi PAD; mengefektifkan pemasukan dari sektor unggulan daerah.

**Tujuan 2: Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh**

akan diwujudkan melalui sasaran sebagai berikut:

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sasaran 1</b> | <b><i>Mengembangkan komoditi pertanian dan peternakan</i></b>                |
| <b>Sasaran 2</b> | <b><i>Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata</i></b>                   |
| <b>Sasaran 3</b> | <b><i>Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan nusantara</i></b>           |
| <b>Sasaran 4</b> | <b><i>Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata</i></b>                 |
| <b>Sasaran 5</b> | <b><i>Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan</i></b>        |
| <b>Sasaran 6</b> | <b><i>Menurunnya kasus pencurian hasil laut dan kerusakan lingkungan</i></b> |

Sasaran pertama akan dicapai melalui tiga program yaitu: Program Pengembangan Agribisnis; Program Pengembangan Hutan Rakyat; dan Program Pengembangan Ketahanan Pangan dengan penanggung jawab Dinas Pertanian dan Kehutanan. Ketiga program tersebut mencakup beberapa kegiatan antara lain: pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional; pengembangan sumber daya manusia di bidang agribisnis; peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan dan tanaman pangan.

Sasaran kedua akan dicapai melalui satu program yaitu Program Penggalan Potensi Pariwisata yang Mampu Bersaing dengan penanggung jawab adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Program tersebut meliputi kegiatan-kegiatan seperti: peningkatan diversifikasi obyek dan daya tarik wisata; memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana pariwisata.

Sasaran ketiga dan keempat akan dicapai melalui Program Promosi Pariwisata dengan penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi kegiatan seperti: pengiriman tim kesenian keluar daerah; mengadakan event yang berkaitan dengan promosi pariwisata.

Sasaran kelima akan dicapai melalui tiga program yaitu: Program Peningkatan Produksi Usaha Perikanan dan Kelautan; Program Pembinaan Nelayan; Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan dengan penanggung jawab program Dinas Perikanan dan Kelautan. Program Peningkatan Produksi Usaha Perikanan dan Kelautan meliputi kegiatan: pembangunan *hatchery* (balai benih ikan); revitalisasi/optimalisasi *hatchery* sungai Samak; memberikan bantuan alat bantu penangkapan ikan; mengembangkan budi daya air laut dan payau. Program Pembinaan Nelayan mencakup kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Budidaya Ikan. Sedangkan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan meliputi kegiatan: mengembangkan dan meningkatkan pelabuhan/pendaratan ikan dan dermaga ikan serta fasilitasnya; dan membangun dan meningkatkan sarana penunjang perikanan.

Sasaran keenam akan dicapai melalui Program Pengawasan/Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan serta Lingkungannya dengan penanggung jawab program adalah Dinas Perikanan dan Kelautan dan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Belitung melalui kegiatan antara lain: penyusunan data base perikanan dan kelautan; rehabilitasi fungsi karang yang rusak, terumbu karang buatan, dan rumpun ikan.

### **Tujuan 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**

akan diwujudkan melalui sasaran sebagai berikut:

- |                  |  |
|------------------|--|
| <b>Sasaran 1</b> | <b><i>Memfasilitasi perluasan kesempatan kerja</i></b>                               |
| <b>Sasaran 2</b> | <b><i>Memperbaiki sarana dan prasarana pemukiman di pedesaan dan perkotaan</i></b>   |
| <b>Sasaran 3</b> | <b><i>Meningkatkan daya dukung sumber daya alam</i></b>                              |
| <b>Sasaran 4</b> | <b><i>Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor-sektor ekonomi unggulan</i></b> |

Sasaran pertama akan dicapai melalui Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja dengan penanggung jawab Dinas Tenaga Kerja yang meliputi kegiatan antara lain: menyusun database tentang bursa tenaga kerja; membantu menyelesaikan kasus perselisihan (arbitrase) antara pekerja dengan pemberi kerja; penyuluhan dan penyelenggaraan diklat *home industry* untuk penerapan teknologi padat karya kepada masyarakat.

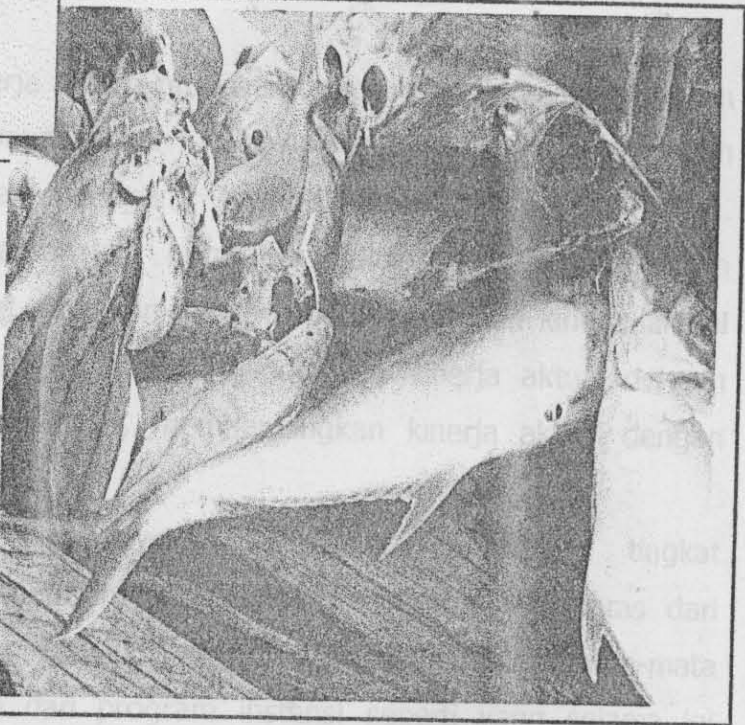
Sasaran kedua akan dicapai melalui tiga program yaitu: Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman; Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Lingkungan; dan Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan dengan

penanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM yang meliputi kegiatan antara lain, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, pembangunan MCK, pemugaran rumah desa dan pelayanan penyediaan air bersih.

Sasaran ketiga akan dicapai melalui Program Pengawasan/pengendalian sumber daya alam dengan penanggung jawab Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Belitung dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung yang meliputi kegiatan-kegiatan antara lain: penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; penertiban usaha pertambangan; dan reklamasi serta reboisasi daerah bekas tambang.

Sasaran keempat akan dicapai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dengan penanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal; dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi kegiatan antara lain: bimbingan keterampilan industri usaha pariwisata; penyuluhan kepada masyarakat dalam pengembangan usaha koperasi; pelatihan dan pengembangan budidaya ikan air tawar; penyuluhan pengelolaan pasca panen; diklat manajemen usaha tani.

# PENGUKURAN KINERJA



## RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

diukur, tetapi lebih mengarah kepada hasil, manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap sumber daya (terutama anggaran). Untuk pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dibangunkan dalam Rencana Strategis.

Untuk menilai dan atau melihat tingkat kinerja pencapaian tujuan dan sasaran, diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

## 6

**PENGUKURAN KINERJA**

**P**engukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan program/kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau targetnya, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja organisasi lain.

Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan suatu instansi pemerintah, seluruh aktivitas dari instansi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program instansi seperti yang selama ini dilakukan, tetapi lebih mengarah kepada hasil, manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap sumber daya (terutama anggaran) sebanyak-banyaknya, walaupun hasilnya sangat mengecewakan. Melalui pengukuran kinerja maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis.

Untuk menilai dan atau melihat tingkat kinerja pencapaian tujuan dan sasaran, diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaiannya. Ukuran tersebut umumnya berupa indikasi-indikasi yang biasa disebut dengan **indikator kinerja**. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja suatu organisasi dari waktu ke waktu menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dengan demikian tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/ ketidakberhasilan) pencapaian tujuan dan sasaran dan pada akhirnya akan sulit juga untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja yang dimaksud meliputi:

- a. Input (masukan) : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*.
- b. Output (keluaran) : segala sesuatu berupa produk/jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- b. Outcome (hasil) : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan *output* (keluaran) program dan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e. Impact (Dampak) : adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan oleh outcome dari suatu program.

Secara konseptual, pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan salah satu sub siklus penting dari implementasi siklus manajemen strategis.



Prasyarat bagi pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja selanjutnya harus didukung oleh keberadaan sub siklus lainnya. Secara keseluruhan siklus manajemen strategis terdiri dari:

a. Sub siklus perencanaan strategis

Pada tahap ini program dan kegiatan ditetapkan dengan mengacu pada kelayakan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi daerah.

b. Sub siklus penganggaran

Pada tahap ini program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap perencanaan strategis ditentukan pembiayaannya dengan mengacu pada kelayakan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

c. Sub siklus Implementasi

Pada tahap ini, program dan kegiatan yang telah ditentukan pembiayaannya dilaksanakan, dimonitor serta didokumentasikan ke dalam bentuk pencatatan yang sistematis sehingga dapat memenuhi kebutuhan data dan fakta untuk evaluasi dan pelaporan.

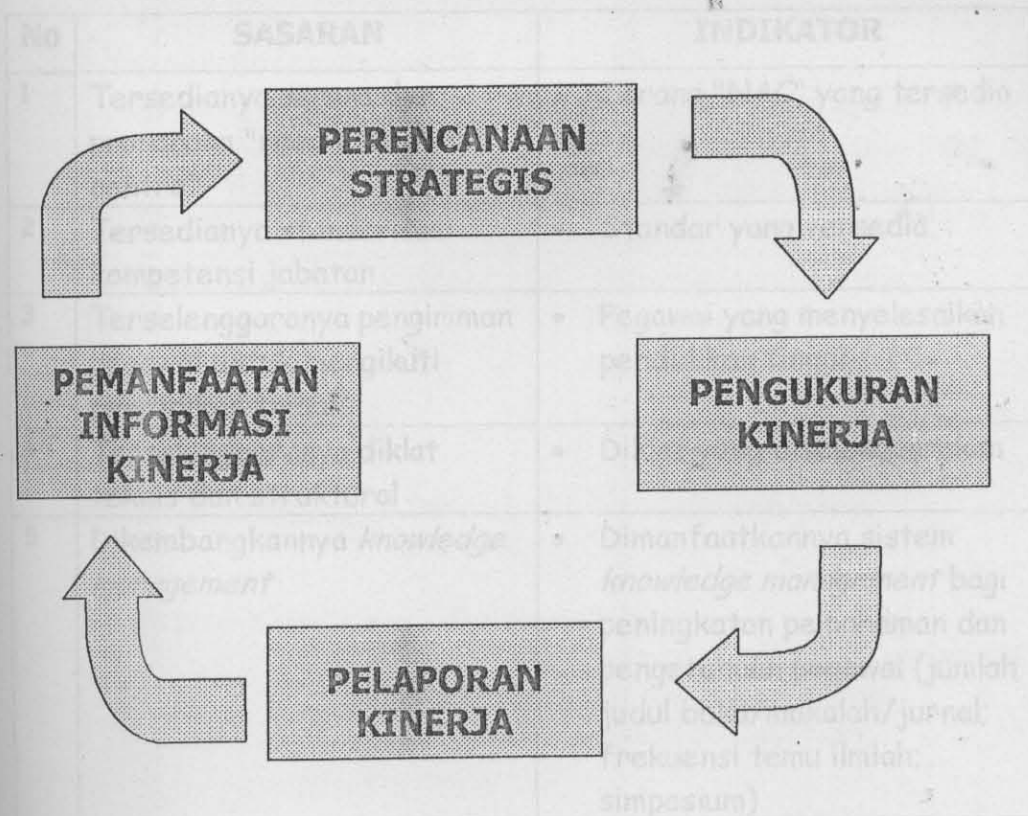
d. Sub siklus pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pada tahap ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan diukur dan dievaluasi serta dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada *stakeholder*.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja selanjutnya memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi serta memenuhi kewajiban prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pada akhirnya keberhasilan dan kegagalan yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi dapat menjadi umpan balik (*feedback*) serta bahan pembelajaran bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## Sistem Akuntabilitas Kinerja



Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator yang terkait sebagai berikut:

**Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan jasa-jasa pemerintahan**

**Tujuan 1 dari Misi 1: Terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, dan dapat dipercaya**

**Indikator Kinerja :**

- Peningkatan kompetensi aparatur
- Peningkatan keahlian aparatur
- Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR
1	Tersedianya sarana dan prasarana "need assesment centre"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana "NAC" yang tersedia</li> </ul>
2	Tersedianya standarisasi kompetensi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar yang tersedia</li> </ul>
3	Terselenggaranya pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegawai yang menyelesaikan pendidikan tinggi</li> </ul>
4	Terselenggaranya diklat teknis dan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat yang diselenggarakan</li> </ul>
5	Dikembangkannya <i>knowledge management</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimanfaatkannya sistem <i>knowledge management</i> bagi peningkatan pemahaman dan pengetahuan pegawai (jumlah judul buku/makalah/jurnal; frekuensi temu ilmiah; simposium)</li> </ul>

**Tujuan 2 dari Misi 1: Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN**

**Indikator Kinerja :**

- Penurunan jumlah kasus yang berindikasi KKN
- Terwujudnya akuntabilitas kinerja di setiap badan/dinas/kantor

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

<p>meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaringan listrik yang dibangun</li> <li>• Persentase penurunan angka kesakitan dan kematian</li> <li>• Rasio sarana kesehatan dibanding jumlah penduduk</li> <li>• Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk</li> </ul>
--	--

No	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kasus yg berindikasi KKN</li> <li>• Tersusunnya kebijakan dalam upaya pemberantasan KKN</li> <li>• Jumlah kasus yg ditindak-lanjuti</li> </ul>
2	Memperkuat basis sistem penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kabupaten Belitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterpaduan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Belitung</li> </ul>

**Tujuan 3 dari Misi 1: Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat**

**Indikator Kinerja :**

- Delivery Time
- Rasio aparat yang melayani terhadap jumlah penduduk
- Inovasi Sistem Pelayanan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan fasilitas pelayanan angkutan laut, darat, udara, telekomunikasi dan kelistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelabuhan laut yang ditingkatkan</li> <li>• Jalan dan jembatan yang ditingkatkan</li> <li>• Panjang landasan pacu yang ditingkatkan</li> <li>• Jaringan telekomunikasi yang dibangun</li> <li>• Jaringan listrik yang dibangun</li> </ul>
2	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delivery Time</li> </ul>
3	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase penurunan angka kesakitan dan kematian</li> <li>• Rasio sarana kesehatan dibanding jumlah penduduk</li> <li>• Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk</li> </ul>

4	Optimalisasi Program RSUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kerja sama dengan swasta di bidang kesehatan</li> <li>• Usia harapan hidup</li> <li>• Angka kematian kasar</li> <li>• Angka kesakitan kasar</li> <li>• Angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan</li> <li>• BOR, LOS, BTO, NDR, GDR</li> </ul>
5	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya serap sekolah terhadap jumlah anak usia sekolah.</li> </ul>
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APK</li> <li>• APM</li> <li>• Rasio guru terhadap murid</li> <li>• Rasio pengajar yang memenuhi kualifikasi pada suatu jenjang pendidikan terhadap standar kebutuhan.</li> </ul>
7	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah bantuan dana pembinaan keagamaan.</li> </ul>

**Misi 2: Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat**

**Tujuan 1 dari Misi 2: Terwujudnya kemandirian keuangan daerah**

**Indikator Kinerja :**

- Rasio penerimaan Daerah Sendiri terhadap Pengeluaran Rutin
- Rasio Penerimaan Daerah Sendiri terhadap PDRB
- Rasio PAD terhadap APBD

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR
1	Optimalisasi Penerimaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase peningkatan PAD</li> <li>• Persentase peningkatan PBB</li> </ul>

**Tujuan 2 dari Misi 2: Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh**

**Indikator Kinerja :**

- Laju pertumbuhan ekonomi
- PDRB
- ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
- Menurunnya tingkat ketergantungan pangan

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR
1	Mengembangkan komoditi pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan pertanian yang dibuka</li> <li>• Hasil produksi (tonase/luas lahan) sektor unggulan</li> <li>• Jlh KUBA pertanian yang terbentuk</li> <li>• Berkurangnya impor beras</li> <li>• Berkembangnya diversifikasi pangan</li> </ul>
2	Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana pariwisata yang diperbaiki/ dibangun</li> </ul>
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah wisatawan yang mengunjungi obyek wisata</li> <li>• Tingkat hunian hotel</li> </ul>
4	Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</li> </ul>
5	Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenaikan produksi hasil laut</li> <li>• Kenaikan PAD.</li> <li>• Bertambahnya usaha budidaya perikanan</li> </ul>
6	Menurunnya kasus pencurian hasil laut dan kerusakan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kasus pencurian hasil laut dan kerusakan lingkungan</li> </ul>

### Tujuan 3 dari Misi 2: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

- Indikator Kinerja :**
- Penurunan angka kemiskinan
  - Rasio KK yang memiliki sarana pemukiman yang layak

Dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	SASARAN	INDIKATOR
1	Memfasilitasi perluasan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkurangnya pengangguran</li> <li>• Peningkatan lapangan kerja baru</li> </ul>
2	Memperbaiki sarana dan prasarana pemukiman di pedesaan dan perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana pemukiman yang dimanfaatkan</li> <li>• Meningkatnya pelayanan air bersih.</li> </ul>
3	Meningkatkan daya dukung SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan</li> <li>• Kelompok pengguna jasa SDA yang dibina</li> </ul>
4	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sektor-sektor ekonomi unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendapatan per kapita</li> </ul>

Untuk periode tiga tahun kedepan sampai dengan tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Belitung masih berfokus pada pencapaian indikator kinerja pada tingkat *low level* atau *intermediate outcome*. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat periode ini merupakan tahap awal dari rencana jangka panjang dalam rangka membangun sistem AKIP menuju sistem manajemen strategis sektor publik yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Belitung sangat menyadari perlunya upaya perbaikan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja. Hal yang sangat penting dari pengukuran kinerja ini adalah perlunya merancang sistem

pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang mampu menghimpun berbagai data kinerja yang dibutuhkan terutama data kinerja *outcome* sehingga menghasilkan informasi kinerja yang dapat diukur validitas dan keandalannya dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja. Praktik-praktik yang ada menunjukkan bahwa perancangan sistem tersebut memerlukan waktu dan mungkin biaya yang tidak sedikit, namun harus terus diupayakan demi terwujudnya sistem AKIP yang dapat diandalkan.

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2003 - 2005



# PENUTUP



## RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

Semuanya itu diharapkan dapat memberi kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap

## 7

**PENUTUP**

**S**ejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pembangunan Kabupaten Belitung akan banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkembang sebagai dampak penerapan otonomi daerah di Kabupaten Belitung. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan, terjadi deviasi/distorsi sasaran yang akan dicapai.

Rencana Strategis Kabupaten Belitung tahun 2003 - 2005 ini tidak terlepas dari kearifan dan konsistensi pihak eksekutif daerah dalam menyikapi situasi dan kondisi yang dinamis.

Dalam kurun waktu pencapaian sasaran untuk tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2005 nanti harapan kita pembangunan daerah menemukan *platform* yang lebih pasti dan jelas yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan pada periode berikutnya.

Penekanan rencana strategis Kabupaten Belitung ini tidak lain adalah sebuah garis kebijaksanaan yang disusun untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Kabupaten Belitung dibangun ditahun 2003 - 2005.

Rencana strategis yang berupa pokok-pokok pikiran dari tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2003 - 2005, selanjutnya secara teknis dapat menjadi acuan bagi jajaran eksekutif agar tercipta sinergi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam program-program kerja sesuai visi dan misi masing-masing dinas/instansi/lembaga daerah yang diikat dengan visi dan misi Rencana Strategis Kabupaten Belitung 2003 -2005

Semuanya itu diharapkan dapat memberi kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap

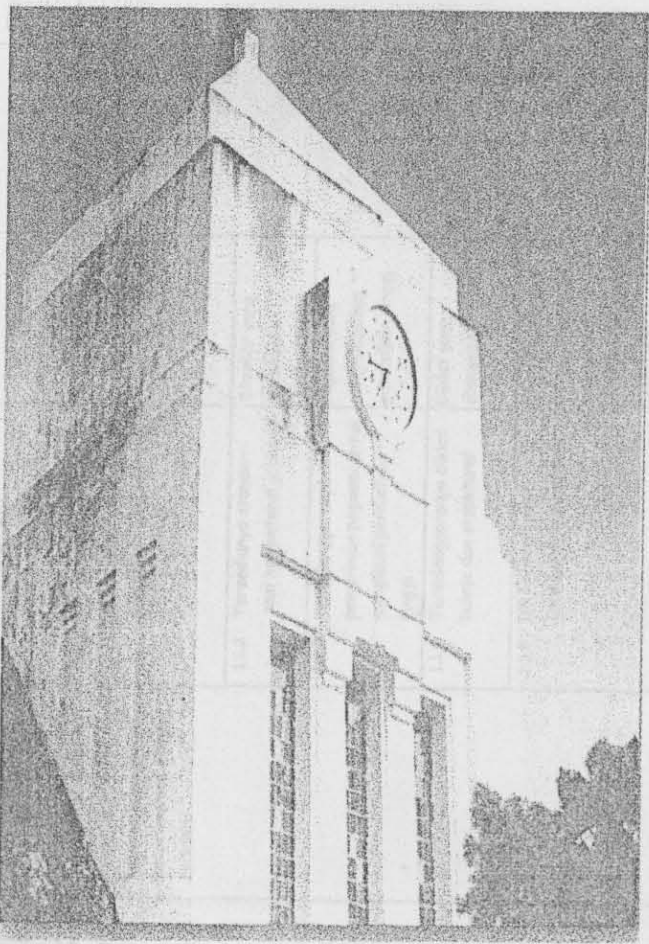
deviasi pelaksanaan yang mungkin timbul, yang pada akhirnya pembangunan Kabupaten Belitung benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Akhir kata, marilah kita menyatukan langkah, bahu-membahu, dan berkomitmen untuk secara bersama-sama membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam menuju *Good Governance*.



RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG  
TAHAP 2003 - 2005

# MATRIK RENCANA STRATEGIS



**RENCANA STRATEGIS KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2003 – 2005**

# MATRIKS RENSTRA KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 - 2005

VISI	MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM	Tahun Pelaksanaan Program			PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2003	2004	2005	
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Belitung yang Maju dan Sejahtera	1 Meningkatkan kualitas pelayanan jasa pemerintahan	1.1 Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang profesional, kreatif, dan dipercaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi Aparatur</li> <li>- Skilled Aparatur</li> <li>- Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan</li> </ul>	1.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana "need assesment centre"	Sarana "NAC" yang tersedia	Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	X	X	X	- BKD
				1.1.2 Tersedianya standarisasi kompetensi jabatan	Standar yang tersedia		X	X	X	
				1.1.3 Terselenggaranya pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi	Pegawai yang menyelesaikan pendidikan tinggi		X	X	X	
				1.1.4 Terselenggaranya diklat teknis dan struktural	Diklat yang diselenggarakan		X	X	X	
				1.1.5 Dikembangkannya <i>knowledge management</i>	Dimanfaatkannya sistem <i>knowledge management</i> bagi peningkatan pemahaman dan pengetahuan pegawai (jumlah judul buku/makalah/jurnal; frekuensi temu ilmiah; simposium)		X	X	X	

V I S I	M I S I	T U J U A N		S A S A R A N		P R O G R A M	T a h u n P e l a k - s a n a n P r o g r a m			P E N A N G G U N G J A W A B
		U R A I A N	I N D I K A T O R K I N E R J A	U R A I A N	I N D I K A T O R K I N E R J A		2003	2004	2005	
		1.2 terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan jumlah kasus yg berindikasi KKN</li> <li>- Terwujudnya akuntabilitas kinerja di setiap badan/dinas/kantor</li> </ul>	1.2.1 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan kasus yg berindikasi KKN</li> <li>- Tersusumnya kebijakan dalam upaya pemberantasan KKN</li> <li>- Jumlah kasus yg difindaklanjuti</li> </ul>	Program Pemberantasan KKN	X	X	X	- Bawaskab
				1.2.2 Memperkuat basis sistem penyelenggaraan administrasi Pemkab Belitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterpaduan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Belitung</li> </ul>	Program Pengembangan Sistem Informasi	X	X	X	- Sekretariat Daerah Kabupaten
	1.3 Terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delivery Time</li> <li>- Rasio aparat yg melayani terhadap jumlah penduduk</li> <li>- Inovasi Sistem Pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan laut yang ditingkatkan.</li> <li>- Jalan dan jembatan yang ditingkan.</li> <li>- Panjang landasan pacu yang ditingkatkan.</li> <li>- Jaringan telekomunikasi yang dibangun.</li> <li>- Jaringan listrik yang dibangun.</li> </ul>	1.3.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan angkutan laut, darat, udara, telekomunikasi dan kelistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan laut yang ditingkatkan.</li> <li>- Jalan dan jembatan yang ditingkan.</li> <li>- Panjang landasan pacu yang ditingkatkan.</li> <li>- Jaringan telekomunikasi yang dibangun.</li> <li>- Jaringan listrik yang dibangun.</li> </ul>	Program Peningkatan/pengembangan fungsi dan fasilitas pelayanan perhubungan laut, darat, udara, telekomunikasi dan kelistrikan.	X	X	X	- Dinas Perhubungan - Dinas PU - Dinas Pertambangan dan Energi

VISI	MISI	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM	Tahun Pelaksanaan Program			PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2003	2004	2005	
				1.3.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	- Delivery Time	- Program Standar Pelayanan - Program Pelayanan Satu Atap	X	X	X	- Bawasab - Sekretariat Daerah Kabupaten
				1.3.3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	- Persentase penurunan angka kesakitan dan kematian - Rasio sarana kesehatan dibanding jumlah penduduk - Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk - Jumlah kerja sama dengan swasta di bidang	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	X	X	X	- Dinas Kesehatan
				1.3.4 Optimalisasi Program RSUD	- Usia harapan hidup - Angka kematian kasar - Angka kesakitan kasar - Angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	X	X	X	
				1.3.4 Optimalisasi Program RSUD	BOR, LOS, BTO, NDR, GDR	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	X	X	X	- RSUD





V I S I	M I S I	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM	Tahun Pelaksanaan Program			PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2003	2004	2005	
		2.2 Terwujudnya struktur perekonomian daerah yang kokoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju pertumbuhan ekonomi</li> <li>- PDRB</li> <li>- ICOR (Incremental Capital Output Ratio)</li> <li>- Menurunnya tingkat ketertungganan pangan</li> </ul>	2.2.1 Mengembangkan komoditi pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan pertanian yang dibuka</li> <li>- Hasil produksi (tonase/luas lahan) sektor unggulan</li> <li>- Jlh KUBA pertanian yang terbentuk</li> <li>- Berkurangnya impor beras</li> <li>- Berkembangnya diversifikasi pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Agribisnis</li> <li>- Program Pengembangan Hutan Rakyat</li> </ul>	X	X	X	- Dinas Pertanian dan Kehutanan
				2.2.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana pariwisata yang diperbaiki/dibangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Pengembangan Ketahanan Pangan</li> </ul>	X	X	X	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2.2.3 Meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah wisatawan yang mengunjungi obyek wisata</li> <li>- Tingkat hunian hotel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program promosi pariwisata</li> </ul>	X	X	X	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				2.2.4 Meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</li> </ul>		X	X	X	
				2.2.5 Meningkatkan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenaikan produksi hasil laut.</li> <li>- Kenaikan PAD.</li> <li>- Bertambahnya usaha budidaya perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program peningkatan produksi usaha perikanan dan kelautan</li> <li>- Program Pembiayaan Nelayan</li> </ul>	X	X	X	- Dinas Perikanan dan Kelautan

V I S I	M I S I	TUJUAN		SASARAN		PROGRAM	Tahun Pelaksanaan Program			PENANGGUNG JAWAB
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2003	2004	2005	
		2.3 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan angka kemiskinan</li> <li>Rasio KK yang memiliki sarana pemukiman yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.3.1 Memfasilitasi perluasan kesempatan kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan kasus pencurian hasil laut dan kerusakan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja</li> </ul>	X	X	X	- Dinas Tenaga Kerja
		2.3 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan angka kemiskinan</li> <li>Rasio KK yang memiliki sarana pemukiman yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.3.2 Memperbaiki sarana dan prasarana pemukiman di pedesaan dan perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya pengangguran</li> <li>Peningkatan lapangan kerja baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Dasar Perumahan</li> <li>Program Peningkatan Kualitas Fasilitas Lingkungan</li> <li>Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkotaan dan Pedesaan</li> </ul>	X	X	X	- Dinas Pekerjaan Umum - PDAM
		2.3 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan angka kemiskinan</li> <li>Rasio KK yang memiliki sarana pemukiman yang layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.3.3 Meningkatkan daya dukung SDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan kasus pencurian hasil laut dan kerusakan lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengawasan dan Pengendalian SDA</li> </ul>	X	X	X	- Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan - Dinas Pertambangan dan Energi

**Lampiran 2**  
**Hasil Proyeksi Model Sederhana Kontribusi Sektoral**  
**Harga Dasar Konstan 1993 Perekonomian Kabupaten Belitung**

NO.	SEKTOR	NILAI (Juta Rp.)				Growth 2001 - 2005
		2002	2003	2004	2005	
1	Pertanian	95,777	101,177.52	106,882	112,909	6%
2	Pertambangan dan Penggalian	44,054	46,462	49,001	51,679	5%
3	Industri Pengolahan	95,752	99,257	102,891	106,657	4%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8,866	9,549	10,285	11,078	8%
5	Bangunan	32,214.40	32,980.06	33,763.91	34,566.40	2%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	95,416.08	101,800.09	108,611.24	115,878.10	7%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	24,118.98	25,135.27	26,194.39	27,298.14	4%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	25,747.95	26,410.12	27,089.33	27,785.99	3%
9	Jasa-jasa	46,476.79	47,445.66	48,434.73	49,444.42	2%
<b>Produk Domestik Bruto</b>		468,424.01	490,217.01	513,152.39	537,294.94	4%

Sumber data : PDRB Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000, yang telah diproyeksi oleh Tim PAU-SE UGM Tahun 2002.

**Lampiran 3.**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Belitung**  
**Tahun Anggaran 1996/1997 - 2002**

Tahun Anggaran	Penerimaan (Rp)	Belanja Rutin (Rp)	%	Belanja Pembangunan (Rp)	%
1996/1997	32.690.158.825	19.244.869.700	58,87	13.445.289.125	41,13
1997/1998	38.238.560.400	24.600.548.650	64,33	13.638.011.750	35,67
1998/1999	34.250.379.221	24.060.197.221	70,25	10.190.182.000	29,75
1999/2000	58.532.968.100	36.618.726.250	62,56	21.914.241.850	37,44
2000*	53.619.149.900	32.434.470.650	60,49	21.184.679.250	39,51
2001	110.992.076.450	101.110.276.620	91,10	9.881.799.830	8,90
2002	163.462.234.296	133.625.652.597	81,75	29.836.581.699	18,25

\*= 1 tahun anggaran ; April - Desember (9 bulan)

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Belitung, diolah

**Lampiran 4.**  
**Pertumbuhan APBD Kabupaten Belitung, 1996/1997 – 2002**

Tahun Anggaran	Penerimaan	%	Belanja Rutin	%	B.elanja Pembangunan	%
1996/1997	32.690.158.825	-	19.244.869.700	-	13.445.289.125	-
1997/1998	38.238.560.400	16,97	24.600.548.650	27,82	13.638.011.750	1,43
1998/1999	34.250.379.221	10,43	24.060.197.221	-2,20	10.190.182.000	-25,28
1999/2000	58.532.968.100	70,90	36.618.726.250	52,20	21.914.241.850	115,05
2000*	53.619.149.900	-8,39	32.434.470.650	-11,43	21.184.679.250	-3,33
2001	110.992.943.866	107	101.110.276.620	211,74	9.881.799.830	-53,35
2002	163.462.234.296	47	133.625.652.597	32,00	29.836.581.699	201,00

\*= 1 tahun anggaran ; April – Desember (9 bulan)

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Belitung, diolah.

**Lampiran 5.**  
**Pos Belanja Terbesar dari APBD Kabupaten Belitung**  
**Tahun 1996/1997 – 2002**

Tahun Anggaran	Belanja Pembangunan			Belanja Rutin		
	Sektor	Jumlah (Rp)	% dari APBD	Belanja	Jumlah (Rp)	% dari APBD
1996/1997	1. Transportasi	4.079.230.000	12,48	Pegawai	11.559.593.200	35,36
	2. Aparatur Pemerintah dan pengawasan	3.971.256.000	12,15			
	3. Pembangunan daerah dan Permukiman	1.820.705.025	5,57			
1997/1998	1. Transportasi	6.130.200.000	16,03	Pegawai	14.517.438.000	37,97
	2. Pembangunan daerah dan Permukiman	2.218.221.000	5,80			
	3. Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.	1.488.007.000	3,89			
1998/1999	1. Transportasi	4.511.350.000	13,17	Pegawai	14.959.643.000	43,68
	2. Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.	1.555.990.000	4,54			
	3. Aparatur Pemerintah dan pengawasan	1.181.887.000	3,45			
1999/2000	1. Transportasi	6.780.230.000	11,58	Pegawai	23.690.893.000	40,47
	2. Pembangunan daerah dan Transmigrasi	4.759.846.830	8,13			
	3. Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.	2.718.071.000	4,64			
2000	1. Transportasi Meteorologi &	6.594.045.350	12,30	Pegawai	21.793.987.000	40,65

Tahun Anggaran	Belanja Pembangunan			Belanja Rutin		
	Sektor	Jumlah (Rp)	% dari APBD	Belanja	Jumlah (Rp)	% dari APBD
	Geofisika					
	2. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	2.593.420.000	4,84			
	3. Perumahan dan Permukiman	2.347.592.000	4,38			
2001	1. Transportasi Meteorologi & Geofisika	3.252.619.880	2,93	Pegawai	57.907.122.506	52,17
	2. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	2.334.171.650	2,10			
	3. Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.	2.324.724.000	2,09			
2002	1. Transportasi Meteorologi & Geofisika	11.755.172.824	7,19	Pegawai	78.706.954.099	48,15
	2. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	2.645.444.000	1,62			
	3. Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.	4.943.400.000	3,02			

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Belitung, diolah

#### Lampiran 6.

#### Alokasi Belanja Pembangunan untuk Sektor Panca Usaha Pokok (PUP) APBD Kabupaten Belitung, 1996/1997 – 2002

Tahun	Lingkup Pertanian (Pertanian, Perikanan & Peternakan)	Perindustrian	Pariwisata dan Jasa	Jumlah Belanja Sektor PUP	APBD	%
1996/1997	496.094.500	38.000.000	46.000.000	580.094.500	32.690.158.825	1,77
1997/1998	772.340.000	43.000.000	26.130.000	841.470.000	38.238.560.400	2,20
1998/1999	787.575.000	35.653.000	47.000.000	870.228.000	34.250.379.221	2,54
1999/2000	1.432.915.000	55.000.000	97.080.000	1.584.995.000	58.532.968.100	2,71
2000	1.300.032.500	45.000.000	115.500.000	1.460.532.500	53.619.149.900	2,72
2001	217.500.000	-	30.000.000	247.500.000	110.992.943.866	0,22
2002	1.339.390.000	365.000.000	180.000.000	1.984.390.000	163.462.234.296	1,21
Rata-rata				1.081.315.714,29		1,91

Sumber : Badan Keuangan kab. Belitung, diolah